

BAB II

DASAR PENDIRIAN NEGARA

Dasar untuk mendirikan Negara dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan pemikiran dan kepentingan. Pergulatan dasar pendirian Negara membawa Negara tersebut ke dalam dinamika kesejarahan. Ada yang berhasil mempertahankannya hingga kini, akan tetapi tidak sedikit yang terpecah belah menjadi beberapa Negara sebagaimana terjadi di Semenanjung Balkan di Eropa Timur, eks Uni Soviet dan di Indonesia. Ada juga yang lenyap dari peta Negara-negara di dunia seperti Kurdistan dan Palestina di Timur Tengah, Tibet di China. Kasmir di India dan sebagainya.

Para pemuka agama tidak sedikit yang menghendaki Negara didirikan berdasarkan paham kedaulatan Tuhan (Teokrasi). Menurut aliran pemikiran kedaulatan Tuhan alasan untuk mendirikan suatu Negara adalah karena adanya perintah Tuhan yang terdapat dalam Kitab Suci. Secara sederhana penganut paham kedaulatan Tuhan di Indonesia berpandangan bahwa demokrasi modern adalah sebagai bentuk intervensi dunia barat terhadap dogma-dogma agama, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Demokrasi sejak kelahirannya mengandung cacat hukum sebab didasarkan pada suatu pandangan filosofis yang keliru. Demokrasi yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat bertentangan dengan pandangan teologis dan ideologis. Sehingga konsep kedaulatan sesungguhnya ada di tangan Tuhan dan dijalankan oleh pemimpin yang mendapatkan wahyu dari Tuhan dan oleh karena selalu terjaga kesuciannya baik dalam pemikiran maupun tindakan. Agama sebagai firman Tuhan telah mencukupi segala-galanya, sehingga tidak membutuhkan pinjaman konseptual dari sumber-sumber lain, seperti demokrasi yang merupakan intervensi Barat terhadap ide dan konsep keagamaan. Negara selayaknya dipimpin oleh para pemimpin yang tercerahkan karena mendapat wahyu dari Tuhan, meskipun elite itu berada di puncak kekuasaan bukan melalui proses pemilihan umum yang demokratis.⁸ Walaupun dapat juga terpilih melalui proses demokrasi yang dikontrol oleh para pemimpin agama.

⁸. Ulil Absar Abdallah, *Memperdalam Demokrasi Tiga Kritik atas Demokrasi dan Mungkin Jalan Lain Demokrasi*, LAKPESDAM NU, Jakarta, 2005, h. 2-3.

Agama dan negara, menurut paradigma ini memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Dalam kerangka hubungan simbiotik ini, adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar sebab tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak. Dalam konsep ini, hukum agama menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi dan otoritas kekuasaan. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum. Dengan demikian tampak adanya kehendak untuk mewarnai hukum–hukum negara dengan hukum agama bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Semakin sedikit kadar atau prosentase keterkaitan fungsional antara Agama dengan Negara semakin sekuler Negara tersebut. Sebaliknya semakin besar kadar atau prosentase keterkaitan fungsional antara Negara dan Agama maka semakin religius Negara tersebut dan dapat disebut sebagai Negara Agama (Teokrasi).

2.1. Interaksi Agama-agama dengan Negara

Sejak dikenalnya suatu struktur dan sistem kekuasaan dalam bentuk Negara, pandangan tentang Raja adalah wakil Tuhan di bumi adalah pandangan yang paling tua, setara Monarki. Konsep tentang Ketuhanan sendiri dimulai dari pada masa-masa pra-sejarah, di dunia Timur terutama di Benua Afrika dan Timur Tengah mengingat kondisi alamnya ganas, manusia prasejarah di dunia Timur banyak tidak dapat bertahan hidup. Hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Satu-satunya tindakan terbaik untuk bertahan hidup adalah melepas kehidupan dan hidup sesudah mati. Mengingat kematian adalah merupakan kejadian sehari-hari dan hal tersebut dapat menimpa siapapun dan kapanpun, maka mereka lebih siap menghadapi kematian daripada mencoba memperbaiki cara untuk bertahan hidup. Mereka kemudian mulai membangun keyakinan akan hidup sesudah mati.

Sementara manusia pra-sejarah di dunia lain atau yang sekarang dikenal sebagai dunia Barat, dengan kondisi alam yang ganas mencoba untuk survival dengan bekerja keras dan mengembangkan teknologi untuk bertahan hidup. Rasionalitas-

materialisme berkembang di Barat, metafisika dan immaterialisme berkembang di Timur.⁹ Dalam praktek ketatanegaraan pandangan kedaulatan Tuhan yang diwakili oleh agama-agama mulai masuk ke dalam sistem ketatanegaraan secara resmi pada abad ke-4. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan sejarah, pada masanya. Penguasa yang umumnya Raja selain pemimpin Negara juga pemimpin Agama. Di Mesir dengan dominasi agama Sumeria ada Firaun, di Persia dengan dominasi agama Zoroaster ada Shah, di Romawi dengan dominasi agama Romawi ada Kaisar. Akan tetapi yang sangat fenomenal dan mempengaruhi praktek ketatanegaraan di dunia masa-masa berikutnya adalah Barat (yang diassumsikan paham kedaulatan Tuhan yang didominasi oleh ajaran Kekristenan) dan Islam, maka buku ini dan dalam point ini hanya akan banyak membahas semata-mata perjalanan sejarah kedua agama besar tersebut dalam konteks interaksinya dengan Negara, serta pengaruh dua agama dan budaya tersebut kedalam pembentukan ketatanegaraan dan demokrasi di masa lalu, agar kita dapat memetik pelajaran daripadanya.

Integrasi Agama dengan Kerajaan juga dipraktekkan oleh agama-agama lainnya misalnya masa keemasan Sriwijaya dan Majapahit, hal tersebut dapat kita lihat dalam Negarakretagama, sampai masa keruntuhannya. Banyak versi pendapat tentang sebab-sebab keruntuhan Negara Agama atau Teokrasi, akan tetapi tulisan lengkap tentang sebab-sebab kejatuhan Negara Agama mulai dicatat secara detail pada tahun 1355 M oleh Ibnu Khaldun ([1332-1406 M](#)) dalam tulisannya berjudul Mukadimah. Beberapa tahun kemudian Niccolo Machiavelli (1469-1527 M) membuat tulisan juga yang berisi catatan tentang bagaimana berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya akan tetapi dengan cara pandang realitas politik yang berkembang saat itu, dengan bukunya yang terkenal *The Prince*.

Supermasi pemimpin agama ke dalam Negara terjadi hampir pada semua agama dengan pengulangan pola yang mirip akan tetapi dalam waktu yang berbeda. Teori siklus Ibnu Khaldun seolah memperoleh pembenaran sejarah. Di awal kemunculan agama memperoleh sambutan meluas dari rakyat menggantikan kepercayaan atau agama lama, karena menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi dipuncak kejayaannya para pemimpin agama yang telah merangkap menjadi pemimpin Negara justru terlena menikmati kemapanan pada posisi berkuasa.

⁹. BBC, *Walking With Cavemen the Complete Series Eye to Eye with Your Ancestors*, Intermedia Prima Vison, Jakarta, 2004.

Pemimpin agama seolah mempunyai pedang bermata dua pada saat awal meraih kekuasaan mereka bersifat reformis bahkan revolusioner akan tetapi pada saat berkuasa, mengambil posisi konservatif, puritan, bahkan hegemonik. Hal tersebut terjadi pada Kerajaan Budha di Jawa yang terjadi pada zaman Dinasti Syailendra pada permulaan abad 9 M. Salah satu monumen pemujaan agama Budha terbesar pada zamannya adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut. Raja adalah pemimpin agama tertinggi. Bangunan keagamaan seperti Borobudur yang semegah itu hanya mungkin terutama berkat dorongan semangat keagamaan yang menyala-nyala di lingkungan Kraton. Hal tersebut dapat terjadi karena dukungan kekayaan Negara dan kemakmuran Rakyat yang berlimpah-limpah.

Mataram Budha adalah Negara pertanian yang didirikan di daerah yang sangat subur. Oleh karena itu sanggup membiayai bangunan keagamaan yang se agung itu dengan usaha gotong royong dan kerjasama antara pemeluk agama. Raja memberikan dana, rakyat menyumbangkan tenaga, seniman menyumbangkan bakat, para Pendeta memberikan petunjuk dalam perencanaannya.¹⁰

Kerajaan Budha akhirnya juga tumbang digantikan Kerajaan Teokrasi Hindu-Jawa karena kehilangan dukungan rakyat. Hal tersebut terjadi pada kuartal pertama abad 10 dimulai dari Kerajaan Panjalu, Janggala, Singhasari, hingga Majapahit.

Kekeliruan merawat rakyat hanya dengan memperhatikan perkembangan agama di masa Kerajaan Budha diperbaiki pada masa Kerajaan Hindu, dengan memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Gajah Mada adalah salah satu pelopornya dengan mengutamakan keagungan Negara dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu pada masa ini tidak ada pembangunan tempat ibadah yang monumental seperti Candi Borobudur. Majapahit meninggalkan bekas-bekas keagungan Negara dengan sebutan Nusantara, yang luasnya melebihi wilayah Indonesia sekarang. Hal tersebut dapat terjadi karena dedikasi para pejabat Negara di masa Majapahit tidaklah perlu diragukan. Mereka tidak hidup bermewah-mewahan dan tidak suka menyakiti hati rakyat, sumpah prasetya Gajah Mada yang terkenal adalah amuktia palapa (1256 Saka/1334 M) yang kurang lebih berarti Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi (1256 Saka/1334 M – 1286 Saka/1364 M) tidak akan hidup bermewah-mewahan sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Sumpah ini mendapat ejekan dan tertawaan dari para menteri dan Patih Amangkubumi Arya Tadah yang digantikannya.

¹⁰ Prof.Dr.Slamet Mulyana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS, Yogyakarta, 2006, h.259.

Sejarah kemudian menunjukkan bahwa Gajah Mada benar. Perluasan Nusantara tetap berlanjut setelah Gajah Mada meninggal akan tetapi Kerajaan Hindu Majapahit akhirnya runtuh karena intrik-intrik politik dalam memperebutkan jabatan.¹¹

Pengaruh pimpinan agama di dalam dunia Kristen juga terjadi dalam kurun waktu yang lama. Pengaruh Kekristenan mendapat tempat secara hukum sehingga mengontrol Negara, ketika Kaisar Konstantinus Yang Agung (280-337 M) Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Nasrani¹², mengeluarkan Edicta Milano (Edik Milano) pada tahun 313 M. Konstantinus berperan penting dalam penyelenggaraan Konsili Nicea Pertama pada tahun 325 M. Kekristenan digunakan oleh Konstantinus untuk melawan agama pribumi Jerman Arianisme, Charlemagne menghancurkan paganisme di Saxony dan digantikan dengan ke-Kristen-an. Arianisme sebaga agama pribumi Jerman dan paganisme Saxony yang dianggap sesat dan menyesatkan. Pada tanggal [27 Februari 380](#) M, Kaisar Teodosius I memberlakukan sebuah hukum yang menetapkan Kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi dan memerintahkan untuk menyebut yang lain dari pada itu sebagai agama sesat¹³. Melimpahnya masyarakat Romawi memeluk agama Nasrani hingga menjadikan agama Nasrani mempunyai pemeluk agama terbesar di dunia sampai sekarang, mengakibatkan merosotnya minat masyarakat terhadap teknologi maupun ilmu pengetahuan¹⁴.

Teknologi dan ilmu pengetahuan yang tumbuh di Eropa adalah budaya yang diwariskan secara turun temurun yang ditumbuhkan sejak jaman pra sejarah, hingga ditemukannya rasionalisme Yunani di masa Aristoteles (450 SM), jauh sebelum agama-agama muncul. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa justru tidak tumbuh pada masa kejayaan kekuasaan gerejani dan kesucian Kristen. Kekeliruan ini mulai disadari oleh Bangsa Eropa setelah 10 abad atau 1000 tahun kemudian, yang ditandai pada masa Renaissance yang dimulai dari Italia (1300 M)¹⁵.

¹¹ Ibid, h.140.

¹² Michael H. Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa, Karisma Publisihing Group, Batam, 2005, h.114

¹³. BBC, Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire, Intermedia Prima Vision, Jakarta, 2007.

¹⁴ . Michael H. Hart, Ibid. h.38

¹⁵ . Michael H. Hart, Ibid. h.18

Dominasi agama pada masa ini yaitu Gereja atas Negara mulai mengalami gangguan pada abad ke-11. Ditandai dengan adanya sebuah perpecahan besar antara Kristianitas Timur dan Barat, yang terkadang disebut [Skisma Akbar](#). Perpecahan terjadi terutama diakibatkan oleh ketidaksepahaman mengenai pemusatan kekuasaan kepada ke-Paus-an. Gereja-Gereja yang tetap menjalin persekutuan dengan Uskup Roma, Sri Paus, membentuk [Gereja-Gereja Roma](#), dan Gereja-Gereja yang tetap berada di luar otoritas kepausan dikenal sebagai Gereja-Gereja ([Ortodoks](#)) [Timur](#).¹⁶

Perpecahan berlanjut ketahun 1186 M yang dikenal luas sebagai Inkuisisi. Penentangan terhadap pemberlakuan hukum Kristen mendapat tentangan dengan skala yang berbeda-beda atau yang dikenal dengan Inkuisisi Spanyol, Portugal, dan Roma¹⁷. Keretakan terbesar dalam sejarah Kekristenan terjadi saat Reformasi Protestan, yang dimulai di [Jerman](#) pada abad ke-16. Selama kurun waktu tersebut pelbagai kelompok masyarakat, seringkali dengan dukungan pemerintah lokal, menolak kekuasaan (primasi) Sri Paus¹⁸. Puncaknya pada tahun 1517 Martin Luther King mengirimkan 95 dalil-dalil di pintu gereja Wittenburg yang berisi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Gereja Katholik Roma.

Salah satu bagian yang dianggap penyimpangan adalah tentang Teori Heliosentris dimana Gereja mendogmakan bumi adalah pusat peredaran tata surya. Matahari dan bintang-bintang berputar mengelilingi bumi. Sementara penemu Teori Helliosentris Copernicus menyatakan bumi berputar pada sumbunya sendiri yang bersama-sama planet lain mengelilingi matahari. Guidarno Bruno yang mengikuti Teori Copernicus dicap Gereja sebagai orang Kafir yang menentang Tuhan dan dibakar hidup-hidup. Galileo yang membela Teori Helliosentris di sweeping dan dipaksa menarik ajarannya dan dihukum penjara seumur hidup. Abad Pencerahan Pemikiran (Rennaisance) di awal abad 16 di Eropa ini merupakan perubahan sosial yang menjungkirbalikan dogma, fundamentalisme, hegemoni dan tirani agama menjadi abad pemikiran dan ilmu pengetahuan. Masyarakat kemudian mengutamakan pembelajaran ilmu pengetahuan daripada agama. Mesin uap, mesin cetak, perbaikan persenjataan membawa Eropa menguasai dunia selama beberapa abad.¹⁹

¹⁶. Op.cit II.

¹⁷. Ibid.

¹⁸. Ibid.

¹⁹ Agus Yuniarto, dkk, Hak Azasi Manusia dan Pengadilan HAM Setengah Hati, h.2.

Perpecahan terjadi karena banyak praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme jabatan gereja. Jabatan tersebut amat strategis karena seluruh fatwa pejabat gereja wajib diikuti oleh pejabat Negara. Penolakan berarti sesat. Sesat berarti pemberontakan terhadap Gereja dan harus ditumpas habis. [Kontra-Reformasi](#) yang diluncurkan Gereja tidak dapat mempertahankan determinasi Gereja atas Negara, akan tetapi Reformasi Kristen dan perbaikan-perbaikannya di satu sisi menyebarkan Kristianitas ke seluruh dunia, melalui kolonisasi bangsa Eropa : ke [Amerika](#), [Asia](#), [Afrika](#), dan [Oceania](#) dengan semangat mengejar : gold (kekayaan), glory (kejayaan) dan gospel (penyebaran agama).²⁰

Di dunia Islam pandangan Negara adalah Tuhan menguat pada masa kekuasaan Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, dan Kesultanan Ustmaniyah (Ottoman). Sebenarnya kelahiran satu Khilafah terjadi karena koreksi atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Khilafah sebelumnya. Hal ini diterangkan oleh ahli tata Negara Muslim Ibnu Khaldun dalam Teori Siklus nya. Tulisan tentang sejarah ketatanegaraan dunia Islam mendapat ruang yang lebih banyak dikarenakan sisa-sisa konflik masa lalu masih berlanjut hingga sekarang di beberapa Negara bahkan mencapai Indonesia.

Dinasti Umayyah adalah dinasti keturunan bangsawan Quraisy Umayyah kakek dari Abu Sofyan penguasa Makkah pra-Islam. Dinasti Umayyah dapat memegang kendali (661-750 M di [Jazirah Arab](#) dan sekitarnya, serta dari 756 - 1031 M di [Kordoba](#), [Spanyol](#)) setelah terjadi Perang Jamal, yaitu perang antara 'Aisyah binti [Abu Bakar](#) (putri khalifah pertama) dengan [Ali bin Abi Thalib](#). Pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafa'ur Rasyidin (atau pemimpin yang mendapat petunjuk dan patut dicontoh), diharapkan mencegah perpecahan antar umat Islam (Sunni dan Syiah) saat itu. Akan tetapi karena semakin kompleksnya situasi politik saat itu terjadilah Perang Jamal.

Adapun menurut sebagian riwayat [Sunni](#), perang yang terjadi antara [Khalifah](#) pada saat itu, [Ali bin Abi Thalib](#)²¹ dan Aisyah dalam [Perang Jamal](#) adalah berita bohong, yang disebarkan oleh kaum yang membenci Islam. Menurut mereka, Aisyah meminta penjelasan kepada Ali kenapa pembunuh [Utsman](#) belum di hukum. Jawaban

²⁰. Op.cit.

²¹ Salah satu kata-katanya yang terkenal adalah : Berbuat baik, jauh lebih baik dari kebaikan itu sendiri. Berbuat jahat, jauh lebih jahat dari kejahatan itu sendiri.

Ali adalah ingin menguasai dahulu kaum yang pada saat itu membela pembunuh Utsman, setelah itu baru hukuman dijalankan, Karena bila hukum dilaksanakan sesegera mungkin bisa mengakibatkan terjadinya dendam. Namun pada malam hari setelah perundingan tersebut, Para pembunuh Utsman & Pengikut Ibnu Sauda (Abdullah bin Saba) yang takut terhadap qishah setelah perundingan tersebut, melakukan serangan kepada pasukan Ali dan pasukan pelindung Aisyah ketika mereka sedang istirahat malam. Sehingga masing-masing dari mereka mengira telah diserang dari belakang.

Sejarawan [Syi'ah](#) meyakini bahwa seharusnya Ali yang menjadi [khalifah](#) pertama, sedangkan tiga khalifah sebelumnya merupakan perampas kekuasaan. Aisyah tidak hanya mendukung ayahnya [Abu Bakar](#), [Umar](#), dan [Utsman](#), Aisyah juga membentuk pasukan dan berperang dengan [Ali](#), menantu-tirinya. Syi'ah menyatakan bahwa ia bersalah pada saat pemberontakan melawan Ali.

Bertujuan untuk mendamaikan kaum Muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya [Utsman Ibn Affan](#) ra, perpecahan-perpecahan dan penghianatan-penghianatan. Serta menjalankan kesepakatan damai dengan menjalankan kekuasaan secara bergiliran antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada [Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan](#). Isi perjanjian Muawiyah dengan [al-Hasan bin Ali](#) disebutkan bahwa persoalan penggantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam.

Akan tetapi suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika [Muawiyah Ibn Abu Sufyan](#) mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, [Yazid Ibn Muawiyah](#). [Muawiyah Ibn Abu Sufyan](#) bermaksud mencontoh monarki di [Persia](#) dan [Bizantium](#). Muawiyah memang tetap menggunakan istilah [khalifah](#), namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Muawiyah menyebutnya "khalifah Allah" dalam pengertian "penguasa" yang diangkat oleh [Allah](#), tidak lagi Khulafa'ur Rasyidin (atau pemimpin yang mendapat petunjuk dan patut dicontoh). Sejak itulah pemerintahan yang bersifat Islamiyyah berubah menjadi monarki hereditas (kerajaan turun temurun). Yazid mengirim surat kepada gubernur [Madinah](#), untuk memaksa

penduduk mengambil sumpah setia kepadanya.²² Saat inilah pernyataan setia (baiat) mulai dikenal dan didesakan kepada ummat Islam.

Pernyataan setia atau baiat didesakan juga oleh Yazid kepada Husain untuk menerima dan membai'at Yazid sebagai penguasa yang sah. Husain yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW menolak melakukan hal tersebut dan ia kemudian pergi ke Makkah dan kemudian ke [Kufah](#) bersama keluarganya. Dalam perjalanan ke Kufah inilah kafilah Husain berhasil dicegat oleh pasukan Umayyah di Karbala. Terjadilah Pertempuran Karbala menurut versi Yazid karena Husain memberontak kepada Pemerintahan yang sah dan melakukan perlawanan.

Menurut versi Syiah terjadi pembantaian karena Husain dan seluruh keluarganya dalam keadaan tidak bersenjata dan bermaksud mengadakan pembicaraan damai. Husain melarang pasukannya, yang terlatih dan cukup besar juga, untuk turut serta karena berkeyakinan Yazid tidak akan berkhianat dan tidak akan melukai Ahlul Bait. Peristiwa terjadi pada tanggal 10 [Muharram](#), tahun ke-61 dari [kalender Islam](#) (9 atau 10 Oktober 680 M) di [Karbala](#), yang sekarang terletak di [Irak](#). Pertempuran terjadi antara pendukung dan keluarga dari cucu [Muhammad](#), [Husain bin Ali](#) dengan pasukan militer yang dikirim oleh [Yazid bin Muawiyah](#). Pihak Husain terdiri dari anggota-anggota terhormat keluarga dekat [Muhammad](#) SAW, sekitar 128 orang, beberapa yang sudah berumur (90+ tahun) atau terlalu muda (6 bulan). Husain dan beberapa anggota juga diikuti oleh beberapa wanita dan anak-anak dari keluarganya. Di pihak lain, pasukan bersenjata Yazid I dipimpin oleh [Umar bin Sa'ad](#). (Pasukan) Husain mati terbunuh dalam peperangan tersebut. Pertempuran (versi Sunni) atau pembantaian (versi Syiah) ini kemudian diperingati setiap tahunnya selama 10 hari yang dilakukan pada bulan Muharram oleh [Muslim Syi'ah](#) seperti halnya segolongan [Sunni](#), dimana puncaknya pada hari kesepuluh, [Hari Asyura](#).²³

Setelah dapat menyatukan kekuasaan maka Dinasti Ummayah meneruskan ekspansi yang terhenti pada masa khalifah [Utsman Ibn Affan](#) dan [Ali Ibn Abi Thalib](#) ra dilanjutkan kembali oleh daulah ini. [Tunisia](#) dapat ditaklukkan, daerah [Khurasan](#) sampai ke sungai [Oxus](#) dan [Afganistan](#) sampai ke [Kabul](#), [Balkh](#), [Bukhara](#), [Khawarizm](#), [Ferghana](#), [Samarkand](#), [India](#), [Balukhistan](#), [Sind](#), daerah [Punjab](#) sampai ke [Malta](#),

²². wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Bani Ummayah, 9 Januari 2009, h.2.

²³. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia-Pertempuran Karbala, 18 Februari 2008. h.2.

dikuasai. [Aljazair](#) dan [Maroko](#) dapat ditundukan. [Thariq bin Ziyad](#), mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama [Gibraltar](#) (Jabal Thariq). Dalam Pertempuran Guadalete (19 Juli 711 M), di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah [Al-Andalus](#) dimana pasukan muslim pimpinan [Tariq bin Ziyad](#) berhasil mengalahkan pasukan [Visigothic](#) pimpinan Raja [Roderic](#). Kemenangan ini dianggap sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan muslim menaklukkan seluruh wilayah Andalusia dikemudian hari sehingga menjadi bagian dari wilayah muslim. Ibu kota [Spanyol](#), [Kordova](#), dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti [Seville](#), [Elvira](#) dan [Toledo](#) yang dijadikan ibu kota [Spanyol](#) yang baru setelah jatuhnya [Kordova](#). Pasukan [Islam](#) memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa setempat.²⁴

Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi [Spanyol](#), [Afrika Utara](#), [Syria](#), [Palestina](#), [Jazirah Arabia](#), [Irak](#), sebagian [Asia Kecil](#), [Persia](#), [Afganistan](#), daerah yang sekarang disebut [Pakistan](#), [Turkmenistan](#), [Uzbekistan](#), dan [Kirgistan](#) di [Asia Tengah](#). Dengan meluasnya wilayah [Yazid ibn Abdul-Malik](#) (720- 724 M). menjadi penguasa yang suka kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat, suka menyalahgunakan amanah atau korupsi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketenteraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan tampilnya khalifah-khalifah Bani Umayyah yang lemah dan bermoral buruk, makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya, pada tahun 750 M, Daulah Umayyah digulingkan Bani Abbas.

Kebangkitan kedua Islam dimulai oleh Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah [kekhalifahan](#) kedua [Islam](#) yang berkuasa di [Bagdad](#) (sekarang ibu kota [Irak](#)), dari tahun 132 H (750 M) s/d. 656 H (1258 M). Pada masa inilah awal masuknya Islam ke Indonesia yaitu mulai tahun 1200-1600 M. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini naik kekuasaan setelah mengalahkan [Bani Umayyah](#) dari semua wilayah, kecuali [Andalusia](#).

²⁴ . Op.Cit, wikipedia-Bani Ummayah II, h.3.

Bani Abbasiyah dibentuk oleh keturunan paman [Nabi Muhammad](#) SAW, yang termuda, Abu [Abbas](#). Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan [kekhalifahan](#) selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya [Islam](#) dan menyuburkan [ilmu pengetahuan](#) dan pengembangan [budaya Timur Tengah](#). Tetapi pada tahun [940](#) kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-[Arab](#), khususnya orang [Turki](#) (dan kemudian diikuti oleh orang Mamluk di [Mesir](#) pada pertengahan [abad ke-13](#)), mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan [dunia](#) Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi.²⁵

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para [khalifah](#) betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan [filsafat](#) dan ilmu pengetahuan dalam [Islam](#). Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.

Pada masa [al-Manshur](#) pengertian [khalifah](#) kembali berubah. Dia berkata, sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi-Nya. Dengan demikian, konsep [khilafah](#) dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari [Allah](#), bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagaimana pada masa [al-Khulafa'ur al-Rasyidin](#). Disamping itu, berbeda dari daulat [Umayyah](#), khalifah-khalifah Abbasiyah memakai "gelar tahta", seperti [al-Manshur](#) adalah "gelar tahta"-nya Sulthan Abu Ja'far. "gelar tahta" itu lebih populer daripada nama yang sebenarnya.²⁶

²⁵ . wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Bani Abbas, 5 Februari 2009, h.1-3.

²⁶ . Ibid. h.4.

Ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tak terdapat di zaman Bani Umayyah menurut Ibnu Khaldun, adalah :²⁷

- Dengan berpindahnya ibu kota ke [Baghdad](#), pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh [Arab Islam](#). Sedangkan dinasti [Bani Umayyah](#) sangat berorientasi kepada [Arab Islam](#). Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan [Persia](#) sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa [Turki](#) sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini.
- Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan [Bani Umayyah](#).
- Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas.

Sebelumnya, belum ada tentara khusus yang profesional. Sebagaimana diuraikan di atas, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Dalam bidang pendidikan, misalnya, di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat dasar dan pendalaman.

Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas, dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa [Arab](#), baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman [Bani Umayyah](#), maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

²⁷ . Ibid. h.5.

Disamping itu masih menurut Ibu Khaldun, kemajuan itu paling tidak, juga ditentukan oleh dua hal,²⁸ yaitu:

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk [Islam](#). Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh [Persia](#), sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Disamping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat dan sastra. Pengaruh [India](#) terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika dan astronomi. Sedangkan pengaruh [Yunani](#) masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.

2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase.

Fase pertama, pada masa khalifah [al-Manshur](#) hingga [Harun al-Rasyid](#). Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan logika (manthiq).

Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah [al-Ma'mun](#) hingga tahun 300 H. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran.

Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Imam-imam madzhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. [Imam Abu Hanifah](#) (700-767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di [Kufah](#), kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan [Persia](#) yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional. Berbeda dengan [Imam Malik](#) (713-795 M) yang lebih banyak menggunakan hadits dan tradisi masyarakat Madinah. Berbeda dengan [Imam Syafi'i](#) (767-820 M) dan [Imam Ahmad ibn Hanbal](#) (780-855 M) mengembalikan sistim madzhab dan pendapat akal semata kepada hadits Nabi serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadits Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi.

²⁸ Ibid. h.6.

Disamping empat pendiri madzhab besar tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak para mujtahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan madzhab-nya pula. Akan tetapi, karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan mazhab itu hilang bersama berlalunya zaman. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang [astronomi](#), kedokteran, filsafat, kimia dan sejarah. Dalam lapangan [astronomi](#) terkenal nama [al-Fazari](#) sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. [Al-Farghani](#), yang dikenal di [Eropa](#) dengan nama [Al-Faragnus](#), menulis ringkasan ilmu [astronomi](#) yang diterjemahkan ke dalam [bahasa Latin](#) oleh [Gerard Cremona](#) dan [Johannes Hispalensis](#). Dalam lapangan kedokteran dikenal nama [ar-Razi](#) dan [Ibn Sina](#). [Ar-Razi](#) adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan [Ibn Sina](#). [Ibn Sina](#) yang juga seorang [filosof](#) berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Diantara karyanya adalah ensiklopedi kedokteran paling besar dalam sejarah. Dalam bidang optikal [Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitsami](#), yang di [Eropa](#) dikenal dengan nama [Alhazen](#), terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya bendalah yang mengirim cahaya ke mata. Di bidang [kimia](#), terkenal nama [Jabir ibn Hayyan](#). Di bidang matematika dengan menciptakan al jabar, terkenal nama [Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi](#), yang juga mahir dalam bidang [astronomi](#), juga ahli dalam ilmu [geografi](#).²⁹

Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang [filsafat](#), antara lain [al-Farabi](#), [Ibn Sina](#), dan [Ibn Rusyd](#). [Al-Farabi](#) banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika dan interpretasi terhadap filsafat [Aristoteles](#). [Ibn Sina](#) juga banyak mengarang buku tentang filsafat dan kedokteran. [Ibn Rusyd](#) yang di Barat lebih dikenal dengan nama [Averroes](#), banyak berpengaruh di Barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan [Averroisme](#)³⁰.

²⁹ Ibid, h.6-8.

³⁰ Ibid. Berawal dari gerakan [Averroisme](#) inilah di [Eropa](#) kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 M dan rasionalisme pada abad ke-17 M. Buku-buku [Ibn Rusyd](#) dicetak di [Venesia](#) Pengaruh peradaban [Islam](#), termasuk di dalamnya pemikiran [Ibn Rusyd](#), ke [Eropa](#) berawal dari banyaknya pemuda-pemuda [Kristen Eropa](#) yang belajar di universitas-universitas [Islam](#) di [Spanyol](#), seperti [universitas Cordova](#), [Seville](#), [Malaga](#), [Granada](#),

Keruntuhan kekuasaan Bani Abbas, menurut [Ibnu Khaldun](#), mulai terlihat sejak awal abad kesembilan. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di propinsi-propinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara [Turki](#) dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan di atas. Pengangkatan anggota militer [Turki](#) ini, dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan [khalifah](#). Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan kebangsaan atau Nasionalisme yang anti Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik yang didasarkan pada fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu. Banyak para amir yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu.

Keruntuhan Dinasti Abbasiyah memunculkan Kesultanan Utsmaniyah atau (Ottoman) (1299–1923), adalah negara multi-etnis dan multi-religius. Negara ini diteruskan oleh [Republik Turki](#) yang diproklamirkan pada [29 Oktober 1923](#). Negara ini didirikan oleh Bani Utsman, yang selama lebih dari enam abad kekuasaannya ([1299-1923 M](#)) sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil. Kesultanan ini menjadi pusat interaksi antar Barat dan Timur.³¹

dan [Salamanca](#). Selama belajar di [Spanyol](#), mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan muslim. Pusat penerjemahan itu adalah [Toledo](#). Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas di [Eropa](#) adalah [Universitas Paris](#) yang didirikan pada tahun 1231 M, tiga puluh tahun setelah wafatnya [Ibn Rusyd](#). Di akhir zaman pertengahan [Eropa](#), baru berdiri 18 buah universitas. Di dalam universitas-universitas itu, ilmu yang mereka peroleh dari universitas-universitas [Islam](#) diajarkan, seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran [al-Farabi](#), [Ibn Sina](#) dan [Ibn Rusyd](#). Pengaruh ilmu pengetahuan [Islam](#) atas [Eropa](#) yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 M itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali (*renaissance*) [pusaka Yunani](#) di [Eropa](#) pada abad ke-14 M. Berkembangnya pemikiran [Yunani](#) di [Eropa](#) kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan [Arab](#) yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun [Islam](#) akhirnya terusir dari negeri [Spanyol](#) dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidangi gerakan-gerakan penting di [Eropa](#). Gerakan-gerakan itu adalah: kebangkitan kembali kebudayaan [Yunani](#) klasik (*renaissance*) pada abad ke-14 M yang bermula di [Italia](#), gerakan reformasi pada abad ke-16 M, rasionalisme pada abad ke-17 M, dan pencerahan (*aufklaerung*) pada abad ke-18 M.

³¹ wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Kesultanan Utsmani, 9 Maret 2009, h.1-2.

Pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Utsmaniyah menjadikan Konstantinopel (sekarang [Istanbul](#)) sebagai ibukotanya, kesultanan ini dianggap sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti [Kekaisaran Romawi](#) dan [Bizantium](#). Akan tetapi banyak sejarawan Barat menolak Kesultanan Utsmani sebagai penerus Kekaisaran Romawi (Timur).³² Pada [abad ke-16](#) dan [ke-17](#), Kesultanan Usmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat.

Kekuatan Kesultanan Usmaniyah terkikis secara perlahan-lahan pada abad ke-19, sampai akhirnya benar-benar runtuh pada abad 20. Setelah [Perang Dunia I](#) berakhir, pemerintahan Utsmaniyah yang menerima kekalahan dalam perang tersebut, mengalami kemunduran di bidang [ekonomi](#). Kemunduran tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masa kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di Barat beserta dengan penemuan jalur alternatif Eropa ke Asia yang melemahkan sendi-sendi perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Efektifitas militer dan struktur birokrasi warisan berabad-abad juga menjadi kelemahan dibawah pemerintahan Sultan yang lemah. Kerajaan-kerajaan Eropa berusaha mengatasi kontrol monopoli jalur perdagangan ke Asia oleh Kesultanan Utsmaniyah dengan menemukan jalur alternatif. Secara ekonomi, pemasukan Spanyol dari benua baru memberikan pengaruh pada devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah dan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Hal ini memberikan efek negatif terhadap semua lapisan masyarakat Utsmaniyah. Selain itu karena menurunnya penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi militer maka di medan perang, akibat inovasi dan kreativitas yang sebelumnya menjadikan faktor kekuatan militer kesultanan mulai menghilang. Dengan demikian Kesultanan Usmaniyah secara perlahan-lahan tertinggal dengan teknologi militer Eropa. Reformasi dilakukan untuk mengatasi keadaan akan tetapi reformasi tersebut mengalami kegagalan karena menurunnya intelektual dan praktek korupsi masih merebak.

Sementara kemajuan di dunia Barat tidak dapat dibendung. Saat itu, khalifah mulai terbuka terhadap demokrasi lewat fatwa syaikhul Islam yang kontroversi. Malah, setelah terbentuk Dewan Tanzimat (1839 M) semakin kokohlah pemikiran Barat, setelah disusunnya beberapa UU, seperti UU Acara Pidana (1840), dan UU Dagang (1850), tambah rumusan Konstitusi 1876 oleh Gerakan Turki Muda, yang

³² BBC, Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire, Intermedia Prima Vision, Jakarta, 2007.

berusaha membatasi fungsi dan kewenangan khalifah. Perombakan ini dianggap intervensi dunia Barat terhadap khalifah. Sementara Gerakan Turki Muda menganggap reformasi tidak berjalan secara cepat sehingga proses kesatuan ideology membuat khalifah tidak dapat mengkonsolidasikan diri, baik ke dalam maupun ke luar. Proses penghancuran khilafah oleh pemuka agama dianggap dilakukan oleh gerakan misionaris, yang masuk melalui Gerakan Turki Muda. Di tengah mundurnya intelektualitas Dunia Islam, mereka mendirikan pusat kajian ketimuran atau orientalisme sejak abad ke-14. Selain itu gerakan nasionalisme memberi stigma pada khilafah sebagai The Sick Man from Europe atau Orang Sakit Dari Eropa. Dari sinilah, lahir gerakan patriotisme dan nasionalisme di Dunia Islam, dengan motif dan corak yang berbeda. Gerakan Nasionalisme berdasarkan agama diantaranya terjadi di dunia Arab dengan dukungan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 - 1206 H/1701-1793 M), sebagai peletak dasar Negara dan melahirkan Kerajaan Arab Saudi.³³

³³ Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang Ulama atau seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan salafiah yang pernah menjabat sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam, para pendukung pergerakan ini sering disebut *wahabbi*, tetapi mereka menolak istilah ini karena pada dasarnya ajaran bin Wahhab adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajarannya sendiri. Karenanya, mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun, yang berarti satu Tuhan (unitarians). Semangat mereka adalah menyebarkan ajaran satu Tuhan, satu Agama, satu Ideologi, dan pada akhirnya satu Negara. Mereka ingin mengembalikan ajaran-ajaran tauhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengikat perjanjian dengan Muhammad bin Saud, seorang pemimpin suku di wilayah Najd. Sesuai kesepakatan, Ibnu Saud ditunjuk sebagai pengurus administrasi politik sementara Ibnu Abdul Wahhab menjadi pemimpin spiritual. Sampai saat ini, gelar "keluarga kerajaan" negara Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud. Namun mufti umum tidak selalu dari keluarga Ibnu Abdul Wahhab. Gerakan ini kemudian melarang umat Islam untuk tidak melanggar syariat dan berbuat syirik, seperti mengunjungi makam Nabi atau makam seorang tokoh agama, kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan penghuninya. Hal ini menurut dia sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak meminta selain kepada Allah. Memperdalam ilmu ketauhidan yang murni, oleh karena itu akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan *aqidah* umat Islam di sana sesuai keyakinannya, yaitu kepada akidah Islam yang menurutnya murni (*tauhid*), jauh dari sifat *khurafat*, *tahayul*, atau *bidah*. Dalam hal ini, jasa-jasa Putera Muhammad bin Saud (pendiri kerajaan Arab Saudi) dengan semua anak cucunya tidaklah boleh dilupakan begitu saja, di mana dari masa ke masa mereka telah membantu perjuangan tauhid ini dengan harta dan jiwa. Golongan ini pada hakikatnya mempunyai tiga golongan musuh-musuh yaitu :

1. Golongan ulama khurafat, yang mana mereka melihat yang haq (benar) itu batil dan yang batil itu haq. Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana dan mempersekutukan Allah dengan penghuni kubur, meminta bantuan dan

Pendirian Kerajaan Arab Saudi sebenarnya dimaksudkan sebagai jawaban atas runtuhnya Khilafat Islamiyah di Turki dan berganti dengan Republik Turki. Pendirian khilafat baru di Saudi juga dimaksudkan untuk mempersatukan ummat Islam dalam khilafat Islamiyah yang baru.

Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Ummayah, Bani Abbasiyah dan Kekaisaran Utsmani atau Kilafah Islamiyah menurut Ibnu Khaldun, adalah :

1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan

Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek kemampuan personal, keluhuran budi serta akhlak yang mulia, serta musyawarah yang terbuka. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana, sisa-sisa konflik-konflik politik yang terjadi di masa lalu. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan kekuasaan terutama pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara ([Bani Qays](#)) dan Arabia Selatan ([Bani Kalb](#)) yang sudah ada sejak zaman sebelum [Islam](#), makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa terutama pada masa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan [mawali](#) (non Arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status [mawali](#) itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan

meminta syafaat padanya, semua itu adalah agama dan ibadah. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi adat tradisi nenek moyangnya, mereka menganggap bahwa orang itu membenci auliya' dan orang-orang soleh, yang berarti musuh mereka yang harus segera diperangi.

2. Golongan ulama taashub, yang mana mereka tidak banyak tahu tentang hakikat Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. Mereka hanya taqlid belaka dan percaya saja terhadap berita-berita negatif mengenai Syeikh yang disampaikan oleh kumpulan pertama di atas sehingga mereka terjebak dalam perangkap Ashabiyah (kebanggaan dengan golongannya) yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan ketaashubannya. Lalu menganggap Syeikh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan, yaitu; anti Auliya' dan memusuhi orang-orang shaleh serta mengingkari karamah mereka. Mereka mencaci-maki Syeikh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad.

3. Golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan, pengaruh dan kedudukan. Maka golongan ini memusuhi beliau supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syeikh yang berpandukan kepada aqidah Salafiyah murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentang beliau.

keangkuhan bangsa [Arab](#) yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan diantara ahli waris. Andalusia (Spanyol), Granada yang merupakan pusat kekuasaan [Islam](#) terakhir di [Spanyol](#) jatuh ke tangan Raja Kastilia [Ferdinand](#) III dan Ratu [Isabella](#) pasangan yang digelar [Los Reyes Católicos](#), dalam Pertempuran Reconquista (Penaklukan Kembali)³⁴.

2. Lemahnya visi, misi dan kepemimpinan pemerintahan daulat Islamiyah pada keturunan terakhir menjelang runtuh

Lemahnya visi, misi dan kepemimpinan pemerintahan daulat Islamiyah pada keturunan terakhir menjelang runtuh, yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Sehingga praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme merebak dan tidak dapat ditanggulangi.

3. Kemajemukan tidak dapat dikelola dengan baik

Toleransi beragama, suku serta ras Arab dan non Arab semakin menguat dan menimbulkan penggolongan-penggolongan. Konflik Islam dengan Kristen dan Yahudi semakin menguat karena para penguasa [muslim](#) mulai melakukan puritanisasi dan tidak menghargai pluralitas masyarakat. Mereka berupaya menaikan upeti dari kerajaan-kerajaan [Kristen](#) dan Yahudi taklukannya. Penunjukan para pejabat dari keturunan Arab terutama pada masa Bani Umayyah walau tidak mampu, menimbulkan ketidakpuasan. Kehadiran [Arab Islam](#) secara perlahan-lahan memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen di Andalusia (Spanyol) pada masa bani Umayyah, Lebanon dan Yahudi di Palestina. Mereka yang dahulunya terpecah belah menjadi bersatu karena mempunyai musuh bersama yaitu Islam. Hal itu menyebabkan kehidupan negara tidak pernah berhenti dari pertentangan antara [Islam](#)

³⁴ Reconquista adalah istilah yang digunakan untuk proses yang dimana kerajaan [Kristen](#) menaklukkan kembali [Semenanjung Iberia](#) (sekarang [Spanyol](#) dan [Portugal](#)) dari umat [Islam](#) Arab. Istilah "penaklukan kembali" digunakan dalam artian daerah-daerah ini dilihat sebagai milik umat [Kristen](#), walaupun kenyataannya pada saat itu orang-orang yang ditaklukkan kebanyakan adalah Muslim dan orang-orang Arab. Di sisi lain sebelum Iberia ditaklukkan kerajaan-kerajaan Islam, semenanjung ini sudah didiami oleh orang-orang yang berbahasa Roman dan mendapat pengaruh Kristen. Pada [2 Januari 1492](#), [Ferdinand II](#) dan [Isabella](#), menyerang Granada, dan hasilnya Sultan Granada [Muhammad XII](#) menyerah tanpa syarat. Kemenangan ini menghasilkan negara [Kristen](#) bersatu di seluruh [Spanyol](#), kecuali [Navarra](#) yang masih terpisah hingga [1512](#). *Reconquista* di [Portugal](#) mencapai puncaknya pada [1249](#), saat raja [Afonso III](#) berhasil menundukkan [Arab-Islam](#).

dan [Kristen](#), Arab dan Non Arab, Sunni dan Syiah. Di bagian belahan dunia lain pada abad ke-11 M umat [Kristen](#) dan Yahudi memperoleh kemajuan yang luar biasa pesat, sementara umat [Islam](#) sedang mengalami kemunduran karena terjadi kemandegan berpikir, puritanisasi dan asketikisme pandangan hidup.

Penganut agama [Kristen](#) dan [Yahudi](#), yang semasa sebelumnya dapat menjalankan agamanya secara tenang dan bebas, pada masa ini mereka tidak boleh berpartisipasi untuk bersma-sama memajukan peradaban [Arab Islam](#). Pada masa kenabian orang-orang [Kristen](#), sebagaimana juga orang-orang [Yahudi](#), disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Masyarakat Islam pada masa Dinasti Umayyah terutama di Andalusia merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihanannya masing masing. Andalusia atau [Spanyol](#) merupakan tempat yang paling utama bagi [Eropa](#) menyerap peradaban [Islam](#), baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang [Eropa](#) menyaksikan kenyataan bahwa [Spanyol](#) berada di bawah kekuasaan [Islam](#) jauh meninggalkan negara-negara tetangganya [Eropa](#), terutama dalam bidang ekonomi, pemikiran dan sains disamping bangunan fisik. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran [Ibn Rusyd](#) (1120-1198 M). Ia melepaskan belenggu [taqlid](#) dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran [Aristoteles](#) dengan cara yang memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Ia mengedepankan sunnatullah menurut pengertian [Islam](#) terhadap [pantheisme](#) dan [anthropomorphisme Kristen](#). Demikian besar pengaruhnya di [Eropa](#), hingga di [Eropa](#) timbul gerakan [Averroeisme](#) ([Ibn Rusydisme](#)) yang menuntut kebebasan berpikir. Pihak [gereja](#) menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan [Averroeisme](#) ini.

4. Perlakuan diskriminasi tetap terjadi walaupun orang Kristen dan Yahudi telah memeluk Islam dan menjadi muallaf.

Para [muallaf](#) dan orang-orang pribumi yang telah memeluk Islam diperlakukan sebagai orang [Islam](#) yang tidak sederajat, terutama pada masa Bani Umayyah. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersebut. Salah satu diantaranya adalah perlawanan

orang-orang [Kristen](#) yang berada di wilayah kekuasaan [Islam](#), yaitu komunitas-komunitas [Kristen Timur](#), [Armenia](#) dan [Maronit Lebanon](#).

5. Penguasa lebih menekankan membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mercusuar dan tidak membina perekonomian dengan baik

Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Para pegawai dan militer tidak dibayar, ekonomi rakyat tidak mengalami kemajuan bahkan kemunduran, hal ini dialami pada hampir semua daulah Islamiyah. Kemunduran ekonomi terjadi selain karena banyaknya pemberontakan di dalam negeri. Awal mula kemunduran semua Khilafah adalah terutama terjadi kemunduran di bidang ekonomi. Pada periode pertama, kekhilafaah Umayyah, Abbasiyah maupun Usmani merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga [Baitul-Mal](#) penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari [al-Kharaj](#), semacam pajak hasil bumi.

Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti, faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan.

6. Munculnya gerakan penyatuan azas

Maksud dari gerakan ini sangat baik, dengan tujuan untuk menyatukan kendali kekuasaan hanya di bawah satu tangan dengan hanya satu ideologi, agar roda pemerintahan dapat dijalankan secara lebih cepat dan efektif. Akan tetapi karena dijalankan dengan tangan besi dan pemaksaan sebagaimana dilakukan pada masa Bani Umayyah, maka penyataan azas ini mengalami banyak penentangan. Penentangan tersebut datang dari Sunni sendiri terlebih lagi Syi'ah. Belum lagi agama asli seperti [Manuisme](#), [Zoroasterisme](#) dan [Mazdakisme](#), yang menjadi minoritas sehingga tidak diakui sebagai agama. Konflik yang dilatarbelakangi agama

tidak terbatas pada konflik antara [muslim](#) dan [zindiq](#) atau [Ahlussunnah](#) dengan [Syi'ah](#) saja, tetapi juga antar aliran dalam [Islam](#).³⁵

7. Ancaman dari Luar.

Apa yang disebutkan di atas adalah faktor-faktor internal. Disamping itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah lemah dan akhirnya hancur.

a. Peperangan yang tidak kunjung akhir

Peperangan yang tidak kunjung akhir diantaranya yang terbesar adalah Perang Salib. [Perang Salib](#) yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. [Perang Salib](#) ini terjadi pada tahun 1095 M, saat [Paus Urbanus II](#) berseru kepada Umat [Kristen](#) di [Eropa](#) untuk melakukan perang suci, untuk memperoleh kembali kekeluargaan berziarah di [Baitul Maqdis](#) yang dikuasai oleh Penguasa [Seljuk](#) yang menetapkan beberapa peraturan yang memberatkan bagi Umat [Kristen](#) yang hendak berziarah ke sana.

Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang [Kristen](#) terhadap umat [Islam](#), yang kemudian mencetuskan [Perang Salib](#).³⁶

³⁵ Ibid, h.7. Berkenaan dengan konflik keagamaan itu, [Syed Ameer Ali](#) mengatakan: "Agama [Nabi Muhammad](#) seperti juga agama [Isa](#), terkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam. Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada kepastiannya dalam suatu kehidupan yang mempunyai akhir, selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang masih dalam lingkungan pengetahuan manusia. Soal kehendak bebas manusia... telah menyebabkan kekacauan yang rumit dalam [Islam](#) ...Pendapat bahwa kepala agama mustahil berbuat salah ... menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa berharga".

³⁶ Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Perang Salib, wikipedia, 3 April 2008. h.1-10. Sebagaimana telah disebutkan, peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh [Alp Arselan](#) adalah peristiwa [Manzikert](#), tahun 464 H (1071 M). Tentara Sulthan [Alp Arselan](#) yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit, dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara [Romawi](#) yang berjumlah 2.000.000 orang, terdiri dari tentara [Romawi](#), [Ghuz](#), [al-Akraj](#), [al-Hajr](#), [Perancis](#) dan [Armenia](#). Kebencian itu bertambah setelah [Dinasti Seljuk](#) dapat merebut [Baitul-Maqdis](#) pada tahun 471 H dari kekuasaan dinasti [Fathimiyah](#) yang berkedudukan di [Mesir](#). Penguasa [Seljuk](#) menetapkan beberapa peraturan bagi umat [Kristen](#) yang ingin berziarah ke sana. Peraturan itu dirasakan sangat menyulitkan mereka. Untuk memperoleh kembali kekeluargaan berziarah ke tanah suci [Kristen](#) itu, pada tahun 1095 M, [Paus Urbanus II](#) berseru kepada umat [Kristen](#) di [Eropa](#) supaya melakukan perang suci. Perang ini kemudian dikenal dengan nama [Perang Salib](#), yang terjadi dalam tiga periode.

Periode Pertama

Pada musim semi tahun 1095 M; 150.000 orang [Eropa](#), sebagian besar bangsa [Perancis](#) dan [Norman](#), berangkat menuju [Konstantinopel](#), kemudian ke [Palestina](#). [Tentara Salib](#) yang dipimpin oleh [Godfrey](#), [Bohemond](#),

dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097 mereka berhasil menaklukkan Nicea dan tahun 1098 M menguasai Raha (Edessa). Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antiochea dan mendirikan kerajaan latin II di Timur. Bohemond dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul-Maqdis (15 Juli 1099 M) dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya, Godfrey. Setelah penaklukan Baitul-Maqdis itu, tentara Salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka (1104 M), Tripoli (1109 M) dan kota Tyre (1124 M). Di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin IV, Rajanya adalah Raymond.

Periode Kedua

Imaduddin Zanki, penguasa Moshul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 M. Namun ia wafat tahun 1146 M. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, Nuruddin Zanki yang berhasil merebut kembali Antiokhia pada tahun 1149 M dan pada tahun 1151 M seluruh Edessa dapat direbut kembali. Kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan Perang Salib kedua. Paus Eugenius III menyampaikan perang suci yang disambut positif oleh Raja Perancis Louis VII dan Raja Jerman Conrad II. Keduanya memimpin pasukan Salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Conrad II sendiri melarikan diri pulang ke negerinya. Nuruddin wafat tahun 1174 M. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi dari Kurdistan yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir tahun 1175 M. Hasil peperangan Shalahuddin terbesar adalah merebut kembali Yerussalem pada tahun 1187 M. Dengan demikian kerajaan latin di Yerussalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerussalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Raja Jerman Frederick Barbarossa, Raja Inggris Richard The Lion Heart, Raja Prancis Philip Augustus. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 M. Meskipun mendapat tantangan berat dari Shalahuddin, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 Nopember 1192 M, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Shalahuddin yang disebut dengan Shulh al-Ramlah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul-Maqdis tidak akan diganggu.

3. Periode Ketiga

Tentara Salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Qibthi. Pada tahun 1219 M, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, al-Malik al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara al-Malik al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 M, di masa pemerintahan al-Malik al-Shalih, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi daulah Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Pada masa merekalah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin, tahun 1291 M. Demikianlah Perang Salib yang berkobar di Timur. Perang ini tidak berhenti di Barat, di Spanyol, sampai umat Islam terusir dari sana. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara Salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali, karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian

b. Serbuan Bangsa Mongol.

Serangan tentara [Mongol](#) ke wilayah kekuasaan [Islam](#), dimulai oleh [Hulagu Khan](#) (565 H/1258 M), tentara [Mongol](#) menghancurkan [Baghdad](#) rata dengan tanah, dan menancapkan kekuasaan di [Baghdad](#) selama dua tahun, sebelum melanjutkan serangan ke [Syria](#) dan [Mesir](#). Jatuhnya kota [Baghdad](#) pada tahun 1258 M ke tangan bangsa [Mongol](#) bukan saja mengakhiri kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban [Islam](#), karena [Baghdad](#) sebagai pusat kebudayaan dan peradaban [Islam](#) yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumihanguskan oleh pasukan [Mongol](#) yang dipimpin [Hulaghu Khan](#) tersebut. Ekspansi dilanjutkan diantaranya oleh [Jengis Khan](#) dan [Timur Lenk](#) dengan semboyannya "Sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi harus hanya ada seorang Raja".

Jatuh banggunya kekhalifahan Islam dicatat oleh seorang sejarawan muslim dari [Tunisia](#) dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu [historiografi](#), [sosiologi](#) dan [ekonomi](#), Ibnu Khaldun atau Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (lahir [27 Mei 1332/732H](#), wafat [19 Maret 1406/808H](#)).³⁷

mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di [Baghdad](#). Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. Budak-budak bangsa [Persia](#) atau [Turki](#) dijadikan pegawai dan tentara. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapat gaji. Oleh Bani Abbas, mereka dianggap sebagai hamba. Sistem perbudakan ini telah mempertinggi pengaruh bangsa [Persia](#) dan [Turki](#). Karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar, mereka merasa bahwa negara adalah milik mereka; mereka mempunyai kekuasaan atas rakyat berdasarkan kekuasaan khalifah. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Setelah [al-Mutawakkil](#), seorang khalifah yang lemah, naik tahta, dominasi tentara [Turki](#) tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang [Turki](#). Posisi ini kemudian direbut oleh [Bani Buwaih](#), bangsa [Persia](#), pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada [Dinasti Seljuk](#) pada periode keempat.

³⁷ Wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Ibnu Khaldun, 10 Juni 2009, h.1-4 Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif, adakalanya dikaji dari perspektif hukum, moral dan adapula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan Barat, seperti ilmuwan Yunani

Salah satu karyanya yang terkenal dalam hal kenegaraan adalah [Muqaddimah](#) (Pendahuluan)³⁸, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah, karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Ibn Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran "resminya" (di Eropa). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka adalah wajar jika pasar yang lainpun akan ikut turun, bahkan dalam agregat yang cukup besar. Apabila pendapat-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir ilmu filsafat sejarah, maka pemahamannya terhadap peranan kerja, kepemilikan dan upah, menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern. Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka tidak mengherankan jika banyak ilmuwan terkemuka kontemporer yang meneliti dan membahas pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu kita masih memiliki kontribusi kajian yang berlimpah tentang Ibnu Khaldun. Ini menunjukkan kebesaran dan kepeloporan Ibnu Khaldun sebagai intelektual terkemuka yang telah merumuskan pemikiran-pemikiran briliyan tentang ekonomi. Paparan di atas menunjukkan bahwa tak disangsikan lagi Ibnu Khaldun adalah Bapak ekonomi yang sesungguhnya. Dia bukan hanya Bapak ekonomi Islam, tapi Bapak ekonomi dunia. Pemikiran Ibn Khaldun banyak menjadi pedoman untuk mengembangkan ide-ide kekuasaan yang bersumber pada Ketuhanan. Nama ini begitu mashur dikalangan pemikir dan Ilmuwan Barat. Ia adalah pemikir dan Ilmuwan Muslim yang pemikirannya dianggap murni dan baru pada zamannya. Tak heran ide-idenya tentang masyarakat Arab seperti yang tertuang dalam buku fenomenalnya "muqaddimah" dianggap sebagai bibit dari kelahiran Ilmu Sosiologi. Penelitiannya tentang sejarah dengan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian Ilmuwan pada saat itu juga disebut sebagai bibit dari kemunculan Filsafat Sejarah seperti yang ada sekarang. Kehidupannya yang malang melintang di Tunisia (Afrika) dan Andalusia, serta hidup dalam dunia politik tak ayal mendukung pemikirannya tentang Politik serta Sosiologi tajam dan mampu memberikan sumbangsih yang besar pada Ilmu Pengetahuan.

³⁸ wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-Teori Siklus Ibnu Khaldun, 16 Juli 2009, h.1-10
Menurut Ibn Khaldun manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Manusia hanya mungkin bertahan untuk hidup dengan bantuan makanan. Sedang untuk memenuhi makanan yang sedikit dalam waktu satu hari saja memerlukan banyak

pekerjaan. Sebagai contoh dari butir-butir gandum untuk menjadi potongan roti memerlukan proses yang panjang. Butir-butir gandum tersebut harus ditumbuk dulu, untuk kemudian dibakar sebelum siap untuk dimakan, dan untuk semuanya itu dibutuhkan alat-alat yang untuk mengadakannya membutuhkan kerjasama dengan pandai kayu atau besi. Begitu juga gandum-gandum yang ada, tidak serta merta ada, tetapi dibutuhkan seorang petani. Artinya, **manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan makanan membutuhkan manusia yang lain.** Selain kebutuhan makanan untuk mempertahankan hidup, menurut Ibn Khaldun manusia memerlukan bantuan dalam hal **pembelaan diri terhadap ancaman bahaya.** Hal ini karena Allah ketika menciptakan alam semesta telah membagi-bagi kekuatan antara makhluk-makhluk hidup, bahkan banyak hewan-hewan yang mempunyai kekuatan lebih dari yang dimiliki oleh manusia. Dan watak agresif adalah sesuatu yang alami bagi setiap makhluk. Oleh karenanya Allah memberikan kepada masing-masing makhluk hidup suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri. Sedang manusia diberikan akal atau kemampuan berfikir dan dua buah tangan oleh Tuhan. Dengan akal dan tangan ini manusia bisa mempertahankan hidup dengan berladang, ataupun melakukan kegiatan untuk mempertahankan hidup lainnya. Tetapi sekali lagi untuk mempertahankan hidup tersebut manusia tetap saling membutuhkan bantuan dari yang lainnya, **sehingga organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah keharusan.** Tanpa organisasi tersebut eksistensi manusia tidak akan lengkap, **dan kehendak Tuhan** untuk mengisi dunia ini dengan umat manusia dan membiarkannya berkembang biak sebagai khalifah tidak akan terlaksana. Setelah organisasi masyarakat terbentuk, dan inilah peradaban, maka masyarakat memerlukan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat. Ini karena manusia mempunyai watak agresif dan tidak adil, sehingga dengan akal dan tangan yang diberikan Tuhan padanya tidak memungkinkan untuk mempertahankan diri dari serangan manusia yang lain karena setiap manusia mempunyai akal dan tangan pula. Untuk itulah diperlukan sesuatu yang lain untuk menangkal watak agresif manusia terhadap lainnya. Ia adalah seseorang dari masyarakat itu sendiri, seorang yang berpengaruh kuat atas anggota masyarakat, mempunyai otoritas dan kekuasaan atas mereka sebagai pengendali. Dengan demikian tidak akan ada anggota masyarakat yang menyerang sesama anggota masyarakat lain. Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Didukung dengan rasa kebersamaan yang terbentuk bahwa seorang pemimpin (rais) dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan tentara yang kuat dan loyal, perdana Menteri, serta pembantu-pembantu yang lain hingga terbentuklah sebuah Dinasti (daulah) atau kerajaan. Pemikiran Ibn Khaldun dalam hal ini agaknya mirip dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles, FArabi, Ibn Abi Rabi', al-Mawardi. Sehingga pemikirannya dalam hal ini bukan hal baru, meskipun ia sendiri mengatakan bahwa teorinya ini adalah yang baru. Tetapi yang membedakannya bahwa penelitian yang dilakukan Ibn Khaldun dalam Muqaddimahya bukan sekadar kajian filosofis, melainkan kajian yang berdasarkan pada pengamatan Inderawi dan analisis perbandingan data-data yang obyektif, sebagai upaya untuk memahami manusia pada masa lampau dan kini untuk meramalkan masa depan dengan berbagai kecenderungannya.

Selain apa yang telah dipaparkan diatas, Ibn Khaldun berpendapat bahwa ada faktor lain pembentuk Negara (daulah), yaitu kekerabatan atau 'ashabiyah. Teorinya tentang 'ashabiyah inilah yang melambungkan namanya dimata para pemikir modern, teori yang membedakannya dari pemikir Muslim lainnya. 'Ashabiyah mengandung makna Group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Yaitu cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan tidak adil atau disakiti. Ibn Khaldun dalam hal ini memunculkan dua kategori sosial fundamental yaitu Badawah (komunitas pedalaman, masyarakat primitif, atau daerah gurun) dan Hadharah (kehidupan kota, masyarakat beradab). Keduanya merupakan fenomena yang alamiah dan Niscaya. Penduduk kota menurutnya banyak berurusan dengan hidup enak. Mereka terbiasa hidup mewah dan banyak mengikuti hawa nafsu. Jiwa

mereka telah dikotori oleh berbagai macam akhlak tercela. Sedangkan orang-orang Badui, meskipun juga berurusan dengan dunia, namun masih dalam batas kebutuhan, dan bukan dalam kemewahan, hawa nafsu dan kesenangan. Daerah yang subur berpengaruh terhadap persoalan agama. Orang-orang Badui yang hidup sederhana dibanding orang-orang kota serta hidup berlapar-lapar dan meninggalkan makanan yang mewah lebih baik dalam beragama dibandingkan dengan orang yang hidup mewah dan berlebih. Orang-orang yang taat beragama sedikit sekali yang tinggal di kota-kota karena kota telah dipenuhi kekerasan dan masa bodoh. Oleh karena itu, sebagian orang yang hidup di padang pasir adalah orang zuhud. Orang Badui lebih berani daripada penduduk kota. Karena penduduk kota malas dan suka yang mudah-mudah. Mereka larut dalam kenikmatan dan kemewahan. Mereka mempercayakan urusan keamanan diri dan harta kepada penguasa. Sedangkan orang Badui hidup memencilkan diri dari masyarakat. Mereka hidup liar di tempat-tempat jauh di luar kota dan tak pernah mendapatkan pengawasan tentara. Karena itu, mereka sendiri yang mempertahankan diri mereka sendiri dan tidak minta bantuan pada orang lain. Untuk bertahan hidup masyarakat pedalaman harus memiliki sentimen kelompok (*'ashabiyyah*) yang merupakan kekuatan pendorong dalam perjalanan sejarah manusia, pembangkit suatu klan. **Klan yang memiliki 'ashabiyyah kuat tersebut dapat berkembang menjadi sebuah negeri. Sifat kepemimpinan selalu dimiliki orang yang memiliki solidaritas sosial.** Setiap suku biasanya terikat pada keturunan yang bersifat khusus (khas) atau umum (*'aam*). Solidaritas pada keturunan yang bersifat khusus ini lebih mendarah-daging daripada solidaritas dari keturunan yang bersifat umum. Oleh karena itu, memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan. Maka **solidaritas sosial yang dimiliki oleh pemimpin harus lebih kuat daripada solidaritas lain yang ada, sehingga dia memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan sempurna.** Solidaritas sosial menjadi syarat kekuasaan. Di dalam memimpin kaum, harus ada satu solidaritas sosial yang berada di atas solidaritas sosial masing-masing individu. Sebab, apabila solidaritas masing-masing individu mengakui keunggulan solidaritas sosial sang pemimpin, maka akan siap untuk tunduk dan patuh mengikutinya. Bangsa-bangsa liar lebih mampu memiliki kekuasaan daripada bangsa lainnya. Kehidupan padang pasir merupakan sumber keberanian. Tak ayal lagi, suku liar lebih berani dibanding yang lainnya. Oleh karena itulah, mereka lebih mampu memiliki kekuasaan dan merampas segala sesuatu yang berada dalam genggamannya bangsa lain. Sebabnya, adalah karena kekuasaan dimiliki melalui keberanian dan kekerasan. Apabila di antara golongan ini ada yang lebih hebat terbiasa hidup di padang pasir dan lebih liar, dia akan lebih mudah memiliki kekuasaan daripada golongan lain. Pendapat Ibn Khaldun dalam hal ini tidak mengherankan, karena beliau melakukan penelitian pada masyarakat 'Arab dan Barbar khususnya yang memang menjalani kehidupan sukar dipadang pasir. **Tujuan terakhir solidaritas adalah kedaulatan.** Karena solidaritas sosial itulah yang mempersatukan tujuan; mempertahankan diri dan mengalahkan musuh. Begitu solidaritas sosial memperoleh kedaulatan atas golongannya, maka ia akan mencari solidaritas golongan lain yang tak ada hubungan dengannya. Jika solidaritas sosial itu setara, maka orang-orang yang berada di bawahnya akan sebanding. Jika solidaritas sosial dapat menaklukkan solidaritas lain, keduanya akan bercampur yang secara bersama-sama menuntun tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan. Akhirnya, apabila suatu negara sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari solidaritas sosial sudah tidak lagi mendukungnya, maka solidaritas sosial yang baru akan merebut kedaulatan negara. Bisa juga ketika negara sudah berumur tua, maka butuh solidaritas lain. Dalam situasi demikian, negara akan memasukkan para pengikut solidaritas sosial yang kuat ke dalam kedaulatannya dan dijadikan sebagai alat untuk mendukung negara. Inilah yang terjadi pada orang-orang Turki yang masuk ke kedaulatan Bani Abbas. **Akan tetapi hambatan jalan mencapai kedaulatan adalah kemewahan. Semakin besar kemewahan dan kenikmatan mereka semakin dekat mereka dari kehancuran, bukan tambah memperoleh kedaulatan. Kemewahan telah menghancurkan dan menyapukan solidaritas sosial.** Jika suatu negara sudah hancur, maka ia akan digantikan oleh orang yang memiliki solidaritas yang campur di dalam solidaritas sosial. Menurut Ibn Khaldun apabila suatu bangsa itu liar,

kedaulatannya akan sangat luas. Karena bangsa yang demikian lebih mampu memperoleh kekuasaan dan mengadakan kontrol secara penuh dalam menaklukkan golongan lain. Tujuan akhir dari solidaritas sosial ('ashabiyyah) adalah kedauletan. **'Ashabiyyah** tersebut terdapat pada watak manusia yang dasarnya bisa bermacam-macam; **ikatan darah atau persamaan keTuhanan, tempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Khusus bangsa Arab menurut Ibn Khaldun, persamaan Ketuhananlah yang membuat mereka berhasil mendirikan Dinasti.** Sebab menurutnya, Bangsa Arab adalah Bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. 'Ashabiyyah yang ada hanya 'ashabiyyah kesukuan/qabilah yang tidak memungkinkan mendirikan sebuah dinasti karena sifat mereka. Hanya karena Agama yang dibawa oleh Nabi mereka akhirnya bisa dipersatukan dan dikendalikan. Tetapi menurutnya pula, bahwa motivasi Agama saja tidak cukup sehingga tetap dibutuhkan solidaritas kelompok ('ashabiyyah). Agama dapat memperkokoh solidaritas kelompok tersebut dan menambah keampuannya, tetapi tetap ia membutuhkan motivasi-motivasi lain yang bertumpu pada hal-hal diluar Agama. Homogenitas juga berpengaruh dalam pembentukan sebuah Dinasti yang besar. Adalah jarang sebuah Dinasti dapat berdiri di kawasan yang mempunyai beragam aneka suku, sebab dalam keadaan demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan, aspirasi, dan pandangan yang berbeda-beda sehingga kemungkinan untuk membentuk sebuah Dinasti yang besar merupakan hal yang sulit. Hanya dengan hegemonitas akan menimbulkan solidaritas yang kuat sehingga tercipta sebuah Dinasti yang besar. Dalam kaitannya tentang 'ashabiyyah, Ibn Khaldun menilai bahwa seorang Raja haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Sebab dalam mengendalikan sebuah negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari luar maupun dalam dia membutuhkan dukungan, loyalitas yang besar dari rakyatnya. Dan hal ini hanya bisa terjadi jika ia berasal dari kelompok yang dominan.

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan Agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk Agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Maka pemerintahan yang dilandaskan pada Agama disebut dengan Khilafah, Imamah atau Sulthanah. Sedangkan pemimpinnya disebut Khalifah, Imam atau Sulthan. Khilafah adalah pengganti Nabi Muhammad dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga imamah adalah wajib menurut hukum agama, yang dibuktikan dengan dibai'atnya Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi ada juga yang berpendapat, imamah wajib karena akal/ perlunya manusia terhadap organisasi sosial. Namun hukum wajibnya adalah fardhu kifayah. Ibn Khaldun sendiri menetapkan 5 syarat bagi khalifah, Imam, ataupun Sulthan, yaitu : 1. Memiliki pengetahuan. 2. Memiliki sifat 'adil. 3. Mempunyai kemampuan. 4. Sehat Panca indera dan badannya. 5. Keturunan Quraisy. Berdasarkan teori 'ashabiyyah, Ibn Khaldun berpendapat sama dengan Pemikir Muslim sebelumnya tentang keutamaan keturunan Quraisy. Ia mengemukakan bahwa orang-orang Quraisy adalah pemimpin-pemimpin terkemuka, original dan tampil dari bani Mudhar. Dengan jumlahnya yang banyak dan solidaritas kelompoknya yang kuat, dan dengan keanggunannya suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi. Maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya, serta mereka hormat pada keunggulan suku Quraisy. Dan jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran. Padahal Nabi menginginkan persatuan, solidaritas, dan persaudaraan. Tetapi menurut Ibn Khaldun hal ini jangan diartikan bahwa kepemimpinan itu dimonopoli oleh suku Quraisy, atau syarat keturunan Quraisy diutamakan daripada kemampuan. Ini hanya didasarkan pada kewibawaan dan solidaritas yang tinggi pada suku Quraisy pada saat itu, hingga ketika suku Quraisy telah dalam keadaan tidak berwibawa, atau ada suku lain yang mempunyai 'ashabiyyah yang tinggi dan kewibawaan yang tinggi, dan juga kepemimpinan dari suku Quraisy sudah tidak dapat lagi diharapkan, maka kepemimpinan dapat berpindah ke suku atau kelompok lain yang mempunyai kewibawaan,

solidaritas, dan kemampuan yang lebih. Pemikiran Ibn Khaldun dalam hal ini mirip dengan pemikiran Al-Mawardi ataupun Ghazali, bahwa khalifah haruslah dari golongan Quraisy. Tetapi Ibn Khaldun merealisasikannya dengan teori 'Ashabiyyah seperti dijelaskan diatas.

Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3 :

1. Pemerintahan yang natural (siyasah thabi'iyah), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (mulk) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya terror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.

2. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (siyasah 'aqliyah), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk Pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela disatu sisi. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu.

3. Pemerintahan yang berlandaskan Agama (siyasah Diniyyah), yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran Agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian Agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam Shalat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum. Dari pembagian pemerintahan diatas, nampak bahwa Ibn Khaldun menempuh jalur baru dibanding Al-Farabi dan Ibn Abi Rabi' dalam pengklasifikasian pemerintahan. Ia tidak memandang pada sisi personalnya, juga pada jabatan Imam itu sendiri, melainkan pada makna fungsional keimamahan itu sendiri. Sehingga menurutnya substansi setiap pemerintahan adalah undang-undang yang menjelaskan karakter suatu sistem pemerintahan.

Berdasarkan teorinya 'ashabiyyah, Ibn Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu Negara atau sebuah peradaban menjadi lima tahap, yaitu :

1. Tahap sukses atau tahap konsolidasi, dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat ('ashabiyyah) yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya.

2. Tahap tirani, tahap dimana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya. 3. Tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. 4. Tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya. 5. Tahap hidup

Manusia dalam mempertahankan hidupnya dan pembelaan diri terhadap ancaman bahaya membutuhkan manusia lain.

Sehingga organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah keharusan dan kehendak Tuhan (Sunatullah), tanpa organisasi tersebut eksistensi manusia tidak akan lengkap.

Masyarakat memerlukan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat.

Ia adalah seseorang dari masyarakat itu sendiri, seorang yang berpengaruh kuat atas anggota masyarakat, mempunyai otoritas dan kekuasaan atas mereka sebagai pengendali. Dengan demikian tidak akan ada anggota masyarakat yang menyerang sesama anggota masyarakat lain.

Faktor lain pembentuk Negara (daulah), yaitu solidaritas atau kekerabatan atau 'ashabiyah. Teorinya tentang 'ashabiyah inilah yang melambungkan namanya dimata para pemikir modern, teori yang membedakannya dari pemikir Muslim lainnya. 'Ashabiyah mengandung makna Group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Yaitu cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan tidak adil atau disakiti. Ibn Khaldun dalam hal ini memunculkan dua kategori sosial fundamental yaitu Badawah (komunitas pedalaman, masyarakat primitif, atau daerah

boros dan berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya.

Tahap-tahap itu menurut Ibnu Khaldun memunculkan tiga generasi, yaitu : 1. Generasi Pembangun, yang dengan segala kesederhanaan dan solidaritas yang tulus tunduk dibawah otoritas kekuasaan yang didukungnya. 2. Generasi Penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. 3. Generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa mempedulikan nasib negara. Jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sebagai sunnatullah sudah di ambang pintu, dan menurut Ibnu Khaldun proses ini berlangsung sekitar satu abad. Ibn Khaldun juga menuturkan bahwa sebuah Peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan dan penuh perjuangan. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan 'Ashabiyyah diantara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Dan kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan diatas kemudian terulang lagi, dan begitulah seterusnya hingga teori ini dikenal dengan Teori Siklus.³⁸

gurun) dan Hadharah (kehidupan kota, masyarakat beradab). Keduanya merupakan fenomena yang alamiah dan niscaya.

Klan yang memiliki ‘ashabiyyah kuat tersebut dapat berkembang menjadi sebuah negeri. Sifat kepemimpinan selalu dimiliki orang yang memiliki solidaritas sosial.

Tujuan akhir dari solidaritas sosial (‘ashabiyyah) adalah kedaulatan. ‘Ashabiyyah tersebut terdapat pada watak manusia yang dasarnya bisa bermacam-macam; ikatan darah atau persamaan keTuhanan, tempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Khusus bangsa Arab menurut Ibn Khaldun, persamaan Ketuhananlah yang membuat mereka berhasil mendirikan Dinasti.

Akan tetapi hambatan jalan mencapai kedaulatan adalah kemewahan. Semakin besar kemewahan dan kenikmatan mereka semakin dekat mereka dari kehancuran, bukan tambah memperoleh kedaulatan. Kemewahan telah menghancurkan dan melenyapkan solidaritas sosial. Jika suatu negara sudah hancur, maka ia akan digantikan oleh orang yang lebih baik dan memiliki solidaritas yang membaaur di dalam solidaritas sosial masyarakat, bukan semakin sulit dijangkau.

Pemimpin yang baik menurut Ibn Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan darimanapun asalnya. Salah satu sumber kebaikan adalah Agama, karena pada dasarnya agama selalu mengajurkan kebaikan, perbaikan peradaban ummat manusia dan hal itu adalah Kehendak Tuhan (Sunatullah). Akan tetapi pemahaman atas Agama dapat menjebak ummat manusia untuk saling membenci dan menggiring ummat manusia kepada satu peperangan ke peperangan yang lain sehingga saling menghancurkan dan meniadakan peradaban, dan hal ini tentunya bertentangan dengan Kehendak Tuhan (Sunatullah). Pemahaman keagamaan dapat mengurung manusia pada pemahaman paling benar sendiri, paling suci sendiri, paling pintar, paling hebat, paling bijaksana dan sebagainya (asketikisme).

Terdapat 5 syarat untuk menjadi pemimpin yang baik, yaitu : Memiliki pengetahuan, Memiliki sifat ‘adil, Mempunyai kemampuan, Sehat Panca indera dan badannya, dan ciri-ciri tersebut banyak berkembang di Keturunan Quraisy. Keutamaan keturunan Quraisy karena orang-orang Quraisy dapat melahirkan pemimpin-pemimpin terkemuka. Dengan jumlahnya yang banyak dan solidaritas kelompoknya yang kuat, dan dengan keanggunannya suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi. Maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka,

sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya, serta mereka hormat pada keunggulan suku Quraisy. Dan jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran. Padahal Nabi menginginkan persatuan, solidaritas, dan persaudaraan. Tetapi hal ini jangan diartikan bahwa kepemimpinan itu dimonopoli oleh suku Quraisy, atau syarat keturunan Quraisy didahulukan daripada kemampuan. Ini hanya didasarkan pada kewibawaan dan solidaritas yang tinggi. Jika suku Quraisy telah dalam keadaan tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dan tidak berwibawa, atau ada suku lain yang mempunyai 'ashabiyyah yang tinggi dan kewibawaan yang tinggi, dan juga lebih baik kepemimpinannya dari suku Quraisy, maka kepemimpinan dapat berpindah ke suku atau kelompok lain yang mempunyai kewibawaan, solidaritas, dan kemampuan yang lebih.

2.2. Tumbuhnya Nasionalisme yang merubah Tata Dunia Baru

Di dunia ketiga gerakan Nasionalisme mulai bangkit untuk mendirikan Negara terlepas dari Negara Induk yang mengkolonisasinya. Pandangan ini melihat bahwa Negara ada karena adanya ikatan rasa kebangsaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara faktual dari seluruh penduduk dunia terbagi dalam golongan-golongan. Ada golongan golongan besar yang berkulit putih, hitam, kuning, merah sawo dan sebagainya. Bahkan ada golongan-golongan yang lebih kecil yang dinamakan suku-suku. Ini adalah suatu fakta, suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, termasuk adanya fakta bangsa dan kebangsaan.³⁹ Negara adalah wadah yaitu suatu mahtsorganisatie, suatu organisasi kekuasaan yang di organisir di atas suatu wilayah yang diatas wilayah tersebut ada manusia-manusianya. Karena itu syarat mutlak pertama suatu Negara adalah wilayah (territory) yang dapat tegas digambarkan di atas peta. Kedua, adalah rakyat yang menyatu dalam rakyat-bangsa (volk-nation). Ketiga, adanya pemerintahan yang efektif.⁴⁰

³⁹. Bung Karno dalam Revolusi Indonesia, Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila, Galang Press, Yogyakarta, 2007, h.139.

⁴⁰. Bung Karno, ibid, h.140.

Pembentukan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan pembangunan kebangsaan Indonesia baru dapat tercapai setelah golongan-golongan rakyat berdasarkan agama, suku, dan ras menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila membuktikan dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.⁴¹ Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hassanudin, Untung Surapati, tanpa mengurangi rasa hormat, menyumbangkan heroisme sebagai bahan dasar pembentukan bangsa akan tetapi tetap saja gagal mendirikan Negara merdeka pada masanya. Tidak dapat mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke karena perjuangannya hanya dijalankan oleh sebagian rakyat Indonesia. Islam sebagai agama baru di Indonesia (masuk 1200 M) dapat mempersatukan sebagian wilayah tapi tidak untuk sebagian wilayah atau suku bangsa lainnya. Sebagai suatu contoh di India, Islam justru menjadi faktor pemecah bangsa.

Bangsa yang merupakan satu nenek moyang tercerai berai menjadi beberapa Negara.⁴² Bahkan di Pakistan pertarungan antara kaum Nasionalis dan pewaris Pan-Islamisme masih terjadi hingga saat ini. Bahkan telah mencapai titik kritis dengan terbunuhnya Ketua Partai Rakyat Pakistan yang Nasionalis, Benazir Bhutto yang tengah berkampanye untuk jabatan Presiden Pakistan. Kamis 27 Desember 2007, terdengar suara ledakan dan rentetan tembakan di Liaquat Bagh Park, Rawalpindi, tempat dimana baru saja Benazir Bhutto berpidato di depan para pendukungnya. Tubuh wanita itu lunglai tak berdaya. Leher dan dadanya ditembus oleh peluru. Benazir Bhutto harus menerima takdir yang sama dengan ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Keduanya menjumpai ajal saat pertikaian politik memanas dinegerinya.⁴³ Di Indonesia, Pancasila adalah pemersatu rakyat jelata di Indonesia untuk memerdekakan diri dari imperialisme. Hal ini berbeda dengan India kemerdekaan digerakan oleh para pengusaha yang menggerakkan gerakan swadesi, swadaya dan swasembada yang akibatnya memboikot barang-barang dari Inggris ke India.⁴⁴

⁴¹. Bung Karno, *ibid*, h.125.

⁴². Bung Karno, *ibid*, h.126.

⁴³. Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2008, h. 177.

⁴⁴. *Loc.cit*, h.127.

Kemunculan paham kedaulatan Negara atau Nasionalisme yang berujung pada separatisme secara faktual menghancurkan khilafah Islam di beberapa tempat dunia. Keberhasilannya membangun sentimen kebangsaan mendorongnya memunculkan Negara berdasarkan paham kebangsaan di seluruh wilayah khilafah. Dorongan kebangsaan di Arab melahirkan Pan-Arabisme yang salah satu pelopornya Gamal Abdul Nasser yang mempunyai pembanding Pan-Islamisme, yang salah satu tokohnya adalah Hasan al-Bana. Pertarungan ini mau tidak mau menjadi menginternasional hingga sekarang.

Dimulai dari Turki sejak tahun [1920](#), [Mustafa Kemal Pasha](#) menjadikan [Ankara](#) sebagai pusat aktivitas politiknya. Setelah menguasai [Istambul](#), [Inggris](#) menciptakan kevakuman politik, dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa sehingga bantuan khalifah dan pemerintahannya mandeg. Instabilitas terjadi di dalam negeri, sementara opini umum menyudutkan khalifah dan memihak kaum nasionalis. Situasi ini dimanfaatkan Mustafa Kemal Pasha untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional - dan ia menobatkan diri sebagai ketuanya - sehingga ada 2 pemerintahan; pemerintahan khilafah di Istambul dan pemerintahan Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Walau kedudukannya tambah kuat, Mustafa Kemal Pasha tetap tak berani membubarkan khilafah. Dewan Perwakilan Nasional hanya mengusulkan konsep yang memisahkan khilafah dengan pemerintahan. Namun, setelah perdebatan panjang di Dewan Perwakilan Nasional, konsep ini ditolak. Pengusulnyapun mencari alasan membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dengan melibatkannya dalam berbagai kasus pertumpahan darah. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional ini diusulkan agar mengangkat Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua parlemen, yang diharap bisa menyelesaikan kondisi kritis ini.

Setelah resmi dipilih jadi ketua [parlemen](#), Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan [republik](#) yang dipimpin seorang [presiden](#) yang dipilih lewat [Pemilu](#). Tanggal [29 November 1923](#), ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama [Turki](#). Namun ambisinya untuk membubarkan khilafah yang telah terkorupsi terintangi. Ia dianggap [murtad](#), dan rakyat mendukung [Sultan Abdul Mejid II](#), serta berusaha mengembalikan kekuasaannya. Ancaman ini tak menyurutkan langkah Mustafa Kemal Pasha. Malahan, ia menyerang balik dengan taktik politik dan pemikirannya yang menyebut bahwa penentang sistem republik ialah pengkhianat

bangsa dan ia melakukan kampanye untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Khalifah digambarkan sebagai bagian dari masa lalu yang harus direformasi.

Setelah suasana negara kondusif, Mustafa Kemal Pasha mengadakan sidang Dewan Perwakilan Nasional. Tepat [3 Maret 1924](#) M, ia memecat khalifah, membubarkan sistem khilafah, dan menghapuskan sistem Islam dari negara. Hal ini dianggap sebagai titik klimaks revolusi Mustafa Kemal Pasha.

Revolusi Turki berimbas ke Kairo dengan pembentukan Partai Desentralisasi yang diketuai Rofiqul 'Adzim. Di Beirut, Komite Reformasi dan Forum harfiah dibentuk. Benih munculnya Nasionalisme sejak jauh hari terjadi pada tahun 1855, negara-negara Eropa-khususnya Inggris-memaksa khilafah Utsmani mengamandemen UUD, sehingga dikeluarkanlah Naskah Hedayat (11 Februari 1855). [Midhat Pasha](#), salah satu anggota Kebatinan Bebas diangkat jadi perdana menteri (1 September 1876). Ia membentuk panitia Ad Hoc menyusun UUD menurut Konstitusi Belgia. Inilah yang dikenal dengan Konstitusi 1876. Namun, konstitusi ini ditolak Sultan Abdul Hamid II karena dinilai bertentangan dengan syari'at. Midhat Pashapun dipecat dari kedudukan perdana menteri. Turki Muda yang berpusat di Salonika-pusat komunitas Yahudi Dunamah-memberontak (1908). Khilafah dipaksanya-yang menjalankan keputusan Konferensi Berlin-mengumumkan UUD yang diumumkan Turki Muda di Salonika, lalu dibukukanlah parlemen yang pertama dalam khilafah Turki Utsmani (17 November 1908). Bekerja sama dengan syaikhul Islam, Sultan Abdul Hamid II dipecat dari jabatannya, dan dibuang ke Salonika. Sejak itu sistem pemerintahan Islam berakhir.

Sistem pemerintahan dan hukum Islam dirubah dengan sistem pemerintahan Modern yang berasal dari Barat. Kampanye mulai dilakukan Rasyid Pasha, Menlu zaman Sultan Abdul Mejid II (1839). Tahun itu juga, Naskah Terhormat -yang dijiplak dari UU di Eropa-diperkenalkan. Di dunia Arab sendiri benih itu muncul pada 8 Juni 1913, para pemuda Arab berkumpul di Paris dan mengumumkan Nasionalisme Arab. Pan-Arabisme memerdekakan sebagian Negara-negara Arab dengan sistem Republik. Pan-Islamisme memerdekakan sebagian Negara-Arab dengan sistem Kerajaan. Sebagian lagi campuran keduanya.⁴⁵

⁴⁵ Wikipedia, Ensiklopedi Bebas Bahasa Indonesia-NU-Muhammadiyah-Sumpah Pemuda Keturunan Arab, h.1-6. Sebagai respon terhadap keruntuhan khilafah sebuah komite didirikan di [Surabaya](#) pada tanggal 4

Oktober 1924 diketuai oleh Wondosoedirdjo (kemudian dikenal sebagai Wondoamiseno) dari Sarekat Islam dan wakil ketua KHA. Wahab Hasbullah. Tujuannya untuk membahas undangan kongres khilafah di Kairo Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Kongres Al-Islam Hindia III di Surabaya pada tanggal 24-27 Desember 1924, yang diikuti 68 organisasi Islam yang mewakili pimpinan pusat (*hoofdbestuur*) maupun cabang (*afdeling*), serta mendapat dukungan tertulis dari 10 cabang organisasi lainnya. Kongres ini juga dihadiri oleh banyak ulama dari seluruh penjuru Hindia Belanda. Keputusan penting kongres ini adalah melibatkan diri dalam pergerakan khilafah dan mengirimkan utusan yang harus dianggap sebagai wakil umat Islam Indonesia ke kongres dunia Islam. Kongres ini memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke Kairo yang terdiri dari Suryopranoto (SI), Haji Fakhruddin (Muhammadiyah) dan KHA. Wahab dari kalangan tradisi. Karena ada perbedaan pendapat dengan kalangan Muhammadiyah, KHA. Wahab dan 3 penyokongnya mengadakan rapat dengan kalangan ulama senior dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka sempat mendirikan Komite Hejaz. Komite ini mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ke kalangan pembaharu (tajdid), yang menyerukan kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di Arab Saudi agar kebiasaan beragama yang benar dapat diteruskan. Komite Hejaz inilah yang diubah namanya menjadi Nahdlatul Ulama pada suatu rapat di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Rapat ini tetap menempatkan masalah Hijaz sebagai persoalan utama. Pada tahun yang sama diselenggarakan Muktamar Alam Islamy Far'ul Hindias Syarqiyah (MAIFHS, Konferensi Dunia Islam Cabang Hindia Timur) di Bogor, sebagai respon atas undangan Kongres Islam Sedunia yang diselenggarakan Ibnu Saud dari Arab Saudi. Pada tanggal 13-19 Mei 1926, diadakan Kongres Dunia Islam di Kairo. Dari Hindia Belanda hadir H. Abdullah Ahmad dan H. Rasul. Di bulan berikutnya (1 Juni 1926) diselenggarakan Kongres Khilafah di Makkah. Saat itu Indonesia mengirimkan 2 utusan, yakni Tjokroaminoto (Central Sarekat Islam) dan K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah). Penunjukan mereka ditetapkan pada Kongres Al-Islam IV di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan V di Bandung (6 Februari 1926). Mereka berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya dengan kapal Rondo dan dielu-elukan masyarakat. Sesampai di Tanjung Priok banyak pemimpin Islam yang menyambut ke pelabuhan. Pada tahun 1927 berlangsung Kongres Khilafah II di Makkah. Hindia-Belanda diwakili oleh H. Agus Salim (SI). Hasilnya, Raja 'Abdul 'Aziz bin Sa'ud (dalam sambutannya) tidak menginginkan dibicarakan masalah khilafah dalam kongres tersebut sehingga kongres itu gagal. Gaung Nasionalisme mempengaruhi sebagai besar keturunan Arab di Hindia Belanda. Pada 1 Agustus 1934, Harian Matahari Semarang memuat tulisan AR Baswedan tentang orang-orang Arab. AR Baswedan adalah peranakan Arab asal Ampel Surabaya. Dalam artikel itu terpampang foto AR Baswedan mengenakan blangkon. Dia mengajak keturunan Arab, seperti dirinya sendiri, menganut asas kewarganegaraan *ius soli* : di mana saya lahir, di situlah tanah airku. Artikel yang berjudul "Peranakan Arab dan Totoknya" berisi anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air. Artikel itu juga memuat penjelasan Baswedan tentang bagaimana sikap nasionalisme yang dianjurkan pada kaumnya. Pokok-pokok pikiran itu antara lain Tanah air Arab peranakan adalah Indonesia, Kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia – Islam, Arab peranakan wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia, Perlu didirikan organisasi politik khusus untuk Arab peranakan; Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat Arab, Jauhi kehidupan menyendiri dan sesuaikan dengan keadaan zaman dan masyarakat Indonesia. Artikel AR Baswedan ini dipilih oleh Majalah Tempo edisi khusus Seabad kebangkitan Nasional (Mei 2008) sebagai salah satu dari 100 tulisan paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Artikel yang menggemparkan itu ditulis AR Baswedan saat dia baru berusia 26 tahun. Karena artikel itu, warga keturunan Arab sempat berang padanya karena memunculkan gagasan merendahkan diri di mata orang-orang Arab di masa itu. Bukan hanya itu, melalui harian Matahari AR Baswedan secara rutin melontarkan pemikiran-pemikiran tentang pentingnya integrasi, persatuan orang Arab di Indonesia, untuk bersama-sama bangsa Indonesia yang lain memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Timbulnya ide mendirikan Partai Arab Indonesia berkaitan erat

dengan pengajuan prinsip tanah air Indonesia bagi kaum peranakan Arab. Ide mendirikan Partai Arab Indonesia dengan pengakuannya tentang tanah air bagi peranakan Arab dicetuskan dan dikembangkan serta juga diperjuangkan. AR Baswedan juga aktif menyerukan pada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Untuk itu, AR Baswedan berkeliling ke berbagai kota untuk berpidato dan menyebarkan pandangannya pada kalangan keturunan Arab.

Pada 4-5 Oktober 1934 para pemuda keturunan Arab dari berbagai kota di Nusantara melakukan kongres di Semarang. Dalam kongres ini mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Kongres pemuda keturunan Arab ini jarang diketahui masyarakat karena tidak diajarkan dalam mata pelajaran sejarah di Indonesia. Padahal, sumpah pemuda keturunan Arab ini memiliki konsekuensi yang besar bagi diri mereka sebagai keturunan Arab dan bagi dukungan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Pada waktu itu masyarakat Arab seluruh Indonesia gempar karena adanya Konferensi Peranakan Arab di Semarang ini. Dalam konferensi PAI di Semarang AR Baswedan pertama-tama mengajukan pertanyaan di mana tanah airnya. Para pemuda yang menghadiri kongres itu mempunyai cita-cita bahwa bangsa Arab Indonesia harus disatukan untuk kemudian berintegrasi penuh ke dalam bangsa Indonesia. Dalam konferensi itu paripatra pemuda Indonesia keturunan Arab membuat sumpah: "Tanah Air kami satu, Indonesia. Dan keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan yang menyendiri (isolasi)". Sumpah ini dikenal dengan Sumpah [Pemuda] Indonesia Keturunan Arab. Menurut AR Baswedan persatuan adalah modal utama bagi Arab peranakan untuk kemudian bersama-sama kaum pergerakan nasional bersatu melawan penjajah. Sebelumnya kongres itu seluruh keturunan Arab -biarpun mereka yang cerdas dan terkemuka- tidak ada yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Mereka berpendapat bahwa tanah airnya adalah di negeri Arab bukan Indonesia. AR Baswedan menjadi pelopor bangkitnya nasionalisme kaum Arab yang awalnya enggan mengakui Indonesia sebagai tanah air. Sejak 4 Oktober 1934 itu keturunan Arab bersatu bersama pergerakan nasional dan meninggalkan identitas ke-Araban, lalu berubah identitas dari semangat keAraban menjadi semangat keIndonesiaan. Sebuah pengakuan yang jelas bagi keturunan Arab bahwa tanah airnya adalah Indonesia. Ketegasan ini pada awalnya banyak yang menentang. Namun perlahan seruan Kongres ini menggema. Banyak peranakan Arab yang mendukung dan mengikuti pergerakan dan gagasan ini. Gagasan sangat berjasa melahirkan kesadaran Indonesia sebagai tanah air bagi orang Arab. Peranakan Arab pada akhirnya diakui sebagai saudara setanah air. Sejarah mencatat pendirian PAI ini selanjutnya memberi efek besar bagi komunitas Arab di Indonesia. Banyak tokoh-tokohnya ikut berjuang saat itu duduk dalam pemerintahan dan aktif dalam masyarakat Indonesia. Anak dan keturunannya di masa sekarang juga tidak sedikit yang berkiprah sebagai tokoh nasional. Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda keturunan Arab. Hasil konferensi itu adalah dibentuknya Persatuan Arab Indonesia yang kemudian menjadi Partai Arab Indonesia. Dalam konferensi itu disepakati pengurus PAI sebagai berikut: AR Baswedan (Ketua), Nuh Alkaf (Penulis I), Salim Maskati (Penulis II), Segaf Assegaf (Bendahara), Abdurrahim Argubi (Komisaris). Tokoh PAI lainnya adalah Hamid Algadri, Ahmad Bahaswan, HMA Alatas, HA Jailani, Hasan Argubi, Hasan Bahmid, A. Bayasut, Syechan Shahab, Husin Bafagih, Ali Assegaf, Ali Basyaib dll. Sumpah Pemuda Keturunan Arab memiliki 3 butir pernyataan yaitu: 1. Tanah Air Peranakan Arab adalah Indonesia. 2. Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri (mengisolasi diri) 3. Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah-air dan bangsa Indonesia. Pemisahan keturunan Arab dengan pribumi merupakan politik Pemerintah Kolonial Belanda yang membagi 3 strata masyarakat di Nusantara. Berdasarkan pasal 131 IS kelas paling atas adalah warga kulit putih (Eropa, Amerika, Jepang dll), kelas dua warga Timur Asing (Arab, India, Cina dll) dan kelas tiga adalah

Gerakan Turki Muda menginspirasi Bung Karno untuk menulis serangkaian artikel dalam Panji Islam berjudul memudahkan pengertian Islam, apa sebab Turki memisahkan agama dari Negara, masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang. Pada dasarnya tulisan tersebut berisi pemisahan urusan agama dengan urusan kenegaraan. Tulisan tersebut berisi pandangan situasi sosial politik luar negeri dan modernisasi Islam yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha di Turki yang berhasil melakukan pemisahan agama dengan negara tanpa meninggalkan Islam.⁴⁶ Menurut Ulil Absar Abdallah sesungguhnya Bung Karno adalah pembaharu Islam sejati karena pemikiran-pemikirannya memperbaiki hubungan Negara dengan Islam. Diantara tulisannya Bung Karno dalam pidatonya menganjurkan kepada ummat Islam di Indonesia agar berani mengambil apinya Islam bukan abunya Islam.⁴⁷

Di sisi lain M. Natsir mengatakan bahwa Islam seperti halnya Pancasila tidaklah berdiri di ruang hampa. Pakistan jelas merupakan suatu Negara Islam baik dilihat dari penduduknya maupun karena pilihannya untuk menyatakan Islam sebagai agama Negara. Demikian halnya Indonesia adalah suatu Negara Islam dengan kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Meskipun dalam UUD 1945 tidak dinyatakan sebagai agama Negara, tapi Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Indonesia menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila yang dianut sebagai landasan rohani, moral dan etika bagi Negara dan bangsa. Dengan demikian maka di Indonesia, Islam menduduki tempat yang sangat mendasar dalam kehidupan kenegaraan, hal mana tidak berarti bahwa sistem Negara kita berbentuk teokrasi.⁴⁸

pribumi Indonesia. Orang-orang Arab yang hijrah ke Indonesia mayoritas berasal dari Hadramauth, Yaman Selatan. Orang-orang Arab yang datang ke Nusantara itu seluruhnya laki-laki dan karena kendala jarak serta karena tradisi Arab (wanita tidak ikut bepergian) maka mereka datang tanpa membawa istri atau saudara wanita. Orang-orang Arab itu menikah dengan wanita pribumi. Jika orang Eropa menyebut pribumi dengan istilah inlander (bangsa kuli) keturunan Arab menyebut pribumi dengan istilah ahwal, yang artinya saudara ibu. Sebab memang seluruh keturunan Arab ibunya pribumi.

⁴⁶ Deliar Noer, Gerakan Modernisme Islam di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1994, h.56.

⁴⁷ Ir. Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Balai Pustaka, Jakarta, 1972, h.245.

⁴⁸ Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, UI Press, Jakarta, 1990.

Dalam pandangan M. Natsir Pancasila sangat Islami, karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bertentangan dengan Tauhid. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tidak bertentangan dengan kewajiban bagi ummat Islam untuk memberikan dan menegakan kedamaian diantara ummat manusia (persaudaraan antar ummat manusia). Sila Persatuan Indonesia tidak bertentangan dengan pengakuan adanya suku-suku, bangsa-bangsa dan golongan-golongan dalam Islam (persaudaraan sesama bangsa). Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah tidak bertentangan dengan perintah Islam untuk memberantas sistem feodal (monarkhi hereditas) dan pemerintahan istibdad atau dictator atau sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan yang tertib. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan kewajiban untuk menegakan keadilan bagi ummat Islam dimanapun dia berada. M. Natsir bahkan menyerukan kepada ummat Islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam.

Menurut Natsir dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Qu'ran ia melihat di dalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Yang patut ditolak adalah Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler. Bila ada ummat Islam yang menjadi chauvinist, suka korupsi dan melanggar perikemanusiaan, maka itu terang-terangan melanggar ketentuan Islam yang nyata-nyata, walau dia Islam. Semua orang tahu bahwa Islam mengenal pembatas yang baik dan buruk dalam kehidupan ketatanegaraan. Beda dengan sekulerisme-rasisme Hitler yang melanggar perikemanusiaan, hal tersebut dapat terjadi karena mereka tidak mempunyai batas pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Negara yang ditempatkan di ruang kosong atau hampa nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh agama, itu berarti Negara tersebut tidak duduk diatas sendi-sendi yang kokoh, mudah labil, mudah terombang-ambing dan tinggal menunggu kehancurannya.⁴⁹

Manusia multi dimensi ini mempunyai semboyan hidup : Selalu-lah meminta kepada Tuhan dan teruslah berbuat baik untuk memperbaiki peradaban, sehingga hidup ini menjadi lebih berarti.⁵⁰ Jika pada pertengahan tahun 1920-an HOS

⁴⁹ M. Natsir dalam Deliar Noer, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Segi Arsy, Bandung, 2004, h.138.

⁵⁰ Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam 100 Tahun Mohammad Natsir, *Berdamai Dengan Sejarah*, Republika, Agustus 2008, h. 477.

Tjokroaminoto dan Haji Rasul (ayah Buya HAMKA), pernah menggalang persatuan ummat Islam di Indonesia untuk mendukung gagasan Pan-Islamisme dan gerakan khilafat. Maka generasi yang dimotori Natsir dan KH. A. Wahid Hasyim, pada pertengahan tahun 1940-an lebih maju selangkah dengan mendukung gagasan Negara Bangsa (nation-state) dalam wadah Masyumi, meski diantaranya kemudian berpisah karena memiliki kendala dengan ideologi Islam yang dianut masing-masing.⁵¹ Generasi pasca Natsir, seperti Munawir Sadjzali, Abdurrahman Wahid, menolak pembentukan Negara Islam dan menerima Pancasila sebagai sebagai satu-satunya dasar Negara. Nurcholis Majid sejak tahun 1970 secara konsisten “menggempur” sendi-sendi bangunan Negara Islam di Indonesia, dengan jargonnya yang terkenal Islam Yes, Partai Islam No. Begitu juga Ahmad Syafii Maarif, yang meski anak Masyumi, sangat kritis terhadap teologi politik para pendahulunya yang dinilainya sangat puritan, formalistis, ideologistis dan tidak substansial. Pada tahun 1982 M.Amien Rais secara tegas melontarkan pernyataan “tidak ada Negara Islam”. Generasi ini merasa lebih nyaman dan tidak ragu-ragu dengan gagasan Negara Pancasila atau Negara pluralis dengan agama-agama yang ada (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu) menjadi pilar-pilarnya. Para generasi Islam berikutnya lebih banyak berdamai dengan sejarah karena Pancasila lebih tepat untuk Indonesia Raya.⁵²

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan kader-kader PKS maupun PPP yang walaupun menawarkan Islam sebagai alternatif jalan lain dari beberapa ideologi. PKS dalam Pasal 2 AD/ART menyebutkan partai berasaskan Islam dan PPP yang menolak peng-azastunggal-an Pancasila karena melanggar pasal 29 UUD 1945. Akan tetapi tetap mengakui Pancasila merupakan sumbangan ummat Islam. Selain itu juga pertentangan antara Islam dan Pancasila dianggap warisan sejarah masa lalu yang (salah satunya diwarnai dengan ketakutan yang berlebihan terhadap penerapan Syariat Islam (Islamphobia)) dan tidak patut dimunculkan dimasa kini. Dimanapun Negara tidak dapat dibangun hanya berdasarkan satu ideologi. Ideologi Islam adalah pilihan lain atau pembanding terhadap ideologi yang ada. Jadi tidak perlu dipertentangkan⁵³

⁵¹ Ibid, h. 478.

⁵² Ibid.

⁵³ Surya Dharma Ali dalam Berita Sore, 22 September 2007.

PKB memang menjadikan Islam Ahlusunnah Waljama'ah sebagai prinsip perjuangan (pasal 4 AD PKB). Akan tetapi PKB menyatakan partainya bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka (pasal 5 AD PKB). Bahkan lebih jauh PKB melarang pemberlakuan Perda Syariat Islam di daerah-daerah, karena yang diperjuangkan PKB adalah spirit Islam yang substansinya adalah kejujuran, keadilan, ketertiban, tidak melakukan korupsi, tidak berbuat keonaran dan bersikap toleransi. Jika perda Syariat Islam (mis : Pamekasan) diberlakukan maka NTT dan Papua akan minta diberlakukan Perda Hukum Kristen atau Perda Hukum Khatolik, di Bali akan minta diberlakukan perda Hukum Hindu.⁵⁴ PKNU berazaskan Islam Ahlusunnah Waljama'ah dan menolak pembentukan Negara Islam Indonesia.⁵⁵

Paham Nasionalisme sendiri adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan [kedaulatan](#) sebuah [negara](#) (dalam [bahasa Inggris](#) "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok [manusia](#). Para [nasionalis](#) menganggap negara ada karena adanya beberapa fakta "kebenaran politik" (political legitimacy). Selain ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang efektif pengakuan dari Negara lain juga dirasa penting. Legitimasi dari Rakyat adalah salah satu hal yang paling penting karena pengakuan adanya Negara dari rakyat juga mengikutsertakan wilayah dimana rakyat yang mengakui tersebut berada. Selain wilayah tentunya juga berbagai macam corak budaya dari suatu rakyat yang memberikan pengakuan juga akan membentuk karakter building dari suatu Negara. Pengakuan rakyat umumnya disertai dengan pengakuan terhadap pemerintah, sebagai pelaksana negara. Penarikan pengakuan biasanya diekspresikan dengan berbagai macam pembangkangan, samanisme, anarkisme bahkan pemberontakan bersenjata.

Ikatan nasionalisme sebagai suatu identitas budaya, tumbuh di tengah masyarakat saat terjadi disorientasi sebagai akibat adanya krisis baik dalam skala kecil terlebih lagi besar dan meluas. Nasionalisme di Indonesia muncul karena terjadinya krisis ekonomi di Negeri Belanda sebagai akibat dari perang yang berkepanjangan di Eropa dan Dunia yaitu Perang Dunia II, sehingga Negara-negara Koloni tidak dapat mengontrol rakyatnya dengan efektif. Selain itu banyak faktor lain penunjang diantaranya menguatnya paham Nasionalisme yang menolak Imperialisme dan Kolonialisme. Penolakan terjadi karena ada ketidakadilan antara Negeri jajahan

⁵⁴ Prof. Dr. Mahfud MD dalam Detikcom, 7 November 2002.

⁵⁵ Choirul Anam, dalam Detikcom, 31 Maret 2007.

dengan Negara penjajah. Ketidakadilan terjadi karena adanya eksploitasi manusia atau bangsa (di Pusat Negeri penjajah) atas manusia atau bangsa (di Pinggiran negeri jajahan) (atau exploitation le home par home) yang terjadi secara berkelanjutan (atau exploitation the long par long), sehingga tercipta kemiskinan struktural di Negara jajahan.

Menurut Budayawan Prof. Dr. Damarjati Supardjan dari UGM hal ini mirip konsep riba. Riba atau menghisap keuntungan dari orang lain tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi belaka. Akan tetapi ada juga riba politik, riba sosial, riba budaya, termasuk dalam hal ini adalah politisasi agama. Riba dilarang karena mengandung eksploitasi atas manusia oleh manusia, terlebih lagi bila dilakukan secara berkelanjutan. Riba ekonomi menimbulkan kemiskinan struktural di bidang ekonomi. Riba politik menimbulkan kemiskinan struktural dibidang politik. Riba sosial menimbulkan kemiskinan struktural dibidang sosial. Riba budaya menimbulkan kemiskinan struktural dibidang budaya.. Kemiskinan struktural mengakibatkan matinya akal dan budi. Matinya akal dan budi berakibat matinya keimanan seseorang. Kesamaan nasib membentuk perasaan solidaritas sesama negeri jajahan dan memperkuat pembentukan identitas kebangsaan. Pembentukan identitas kebangsaan mendorong pembentukan Negara. Akan tetapi pembentukan identitas kebangsaan bukanlah satu-satunya alasan untuk mendirikan Negara banyak faktor-faktor lain. Misalnya Philipina tetap mempertahankan identitas negeri penjajah Spanyol akan tetapi dapat membentuk Negara yang terlepas dari negeri penjajah. Oleh karena itu Philipina terkenal sebagai bangsa yang telah berganti kulit (dari segi identitas budaya) akan tetapi ras dan warna kulit tetap Asia.

Nasionalisme yang membentuk Negara kemudian menjadikan hukum Negara adalah hukum resmi (positivisme). Walau begitu penolakan terhadap pengakuan hukum Negara tetap saja terjadi sehingga ada istilah “negara” di dalam Negara. Selain resistensi dari dalam juga terdapat resistensi dari luar yaitu internasionalisme. Internasionalisme dapat bermotif ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. Indonesia tidak lepas dari pengaruh gerakan-gerakan Internasional. Internasionalisme ekonomi yang bercorak neoliberal-kapitalistik melahirkan globalisasi. Internasionalisme ekonomi yang bercorak sosialis diantaranya menghasilkan komintern. Internasionalisme budaya yang bercorak agama diantaranya menghasilkan gerakan muwahidun.

Nasionalisme juga dapat lahir berdasarkan percampuran dari berbagai elemen yang ada dalam rakyat diantaranya [etnis](#), [budaya](#), agama dan [ideologi](#), seperti di Indonesia. Nasionalisme berdasarkan etnis dan agama diantaranya memerdekakan Negara Timor Leste. Nasionalisme berdasarkan aliran agama dan ikatan keluarga (bani) diantaranya memerdekakan Saudi Arabia. Berdasarkan fakta-fakta sejarah tentang asal-usul terbentuknya Nasionalisme maka Nasionalisme dapat dibagi, menjadi :

2.2.1 [Nasionalisme Masyarakat sipil](#) (civil nasionalisme)

Adalah nasionalisme dimana negara memperoleh pembenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, karena pembentukan nasionalisme merupakan benar-benar kehendak rakyat dari semua elemen etnis, ras, budaya, agama, dan ideologi. Teori ini dibangun oleh Jean-[Jacques Rousseau](#) dan menjadi bahan-bahan tulisan dalam bukunya berjudul [Du Contract Sociale](#) (Mengenai Kontrak Sosial).

2.2.2 [Nasionalisme Etnis](#)

Adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh pembenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh [Johann Gottfried](#), yang memperkenalkan konsep Volk ([bahasa Jerman](#) untuk "rakyat"). Konsep ini digunakan oleh Adolf Hitler untuk membangkitkan semangat Rakyat Jerman yang terpuruk setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I dan diharuskan membayar upeti atau pampasan perang kepada Sekutu, selama bertahun-tahun. Keunggulan Ras Arya diatas segala-galanya jauh diatas ras-ras lain di dunia, termasuk Yahudi. Keunggulan ras tersebut membutuhkan ruang hidup yang lebih luas (lebens raum). Agama pribumi Jerman Arianisme dibangkitkan untuk melawan hegemoni Kekristenan. Pembangkitan Nasionalisme etnis ini justru membawa Jerman kepada kehancuran untuk kedua kalinya dalam Perang Dunia II.⁵⁶

⁵⁶ BBC, World War, 2005.

2.2.3 Nasionalisme Romantik

(juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah bentuk nasionalisme dimana negara memperoleh pembenaran politik secara organik bersumberkan semangat [romantisme](#) kejayaan sejarah masa lalu. Misalnya pemunculan ide-ide Negara Nusantara Raya berdasarkan kejayaan zaman Majapahit.

2.2.4 Nasionalisme Budaya

Adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh pembenaran politik dari budaya bersama dan bukan [warna kulit](#), [ras](#), ideologi dan agama. Misalnya : Rakyat [Tionghoa](#) yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan [Manchu](#) serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara [Tiongkok](#). Banyak rakyat [Taiwan](#) menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak [RRC](#) karena pemerintahan RRT berpaham [komunisme](#). Pemerintah RRT juga memberlakukan dwikewarganegaraan kepada keturunan Tionghoa di seluruh dunia, yaitu kewarganegaraan Negara setempat dan kewarganegaraan RRT, bila diinginkan.

2.2.5 Nasionalisme Kenegaraan

Adalah variasi nasionalisme [kewarganegaraan](#), selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik begitu kuat sehingga ditempatkan lebih utama untuk melawan internasionalisme atau universalisme, bahkan terkadang mengorbankan kebebasan. Nasionalisme ini menginginkan kejayaan dan keunggulan suatu negeri atas negeri-negeri lain. Nasionalisme ini sering terjebak pada narsisme, chauvinistik bahkan kediktatoran. Misalnya [Nazionalisme-Socialisme](#) (NAZI) di Jerman, dalam bentuk yang lebih kecil gerakan [Franquisme](#) sayap-kanan di [Spanyol](#), gerakan [Jacobin](#) di [Perancis](#), gerakan Partai Nasional Paula Hanson di Australia yang mempunyai program Australia untuk Bangsa Australia, gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang mempunyai program Amerika Serikat untuk Kulit Putih, gerakan Fleming, nasionalis [Basque](#) atau [Korsika](#) di Belgia, Spanyol dan Perancis, penolakan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa karena perbedaan agama dan budaya. Secara sistematis, bila nasionalisme kenegaraan itu kuat meniadakan nasionalisme yang lain misalnya nasionalisme [Kurdi](#) yang pernah membentuk Negara Kurdistan serta tanah air Pahlawan Islam Shalahudin al Ayyubi, dikalahkan oleh Nasionalisme Turki, Irak dan Iran dimana bangsa dan wilayah Kurdistan pernah ada.

2.2.6 Nasionalisme Agama

Adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh pembenaran (legitimasi) politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di [Irlandia](#) semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu [Katolik](#). Nasionalisme di [India](#) seperti yang diamalkan oleh pengikut partai [BJP](#) bersumber dari [agama Hindu](#). Nasionalisme di Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh bersumber dari ajaran agama Islam. Nasionalisme di Tibet bersumber dari ajaran agama Budha.

2.3. Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi dalam Sejarah Modern

Paham kedaulatan rakyat bersumber dari ajaran tentang Demokrasi yaitu suatu bentuk atau mekanisme [sistem pemerintahan](#) suatu negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan [warganegara](#)) atas Negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip [trias politica](#) yang membagi ketiga kekuasaan politik negara ([eksekutif](#), [yudikatif](#) dan [legislatif](#)), yang saling mandiri dan sejajar agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip [checks and balances](#).

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan : pemerintahan atau eksekutif, peradilan melalui lembaga-lembaga pengadilan atau yudikatif dan perwakilan rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Di bawah sistem ini, [legislatif](#) menjalankan fungsi pengawasan, budgeting, hak inisiatif, hak angket,

Kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau wakil-wakilnya di Anggota DPRD dijalankan melalui pemilihan umum Presiden, dan Anggota DPRD. Kedaulatan rakyat juga dijalankan secara terbatas di yudikatif melalui DPR, misalnya pemilihan Hakim Agung.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Di dunia Islam sendiri pada masanya, cikal bakal demokrasi modern mulai dijalankan pada saat pemilihan pengganti Nabi Muhammad SAW, dimana peralihan pemimpin tidak lagi

didasarkan pada keturunan. Selain itu pemilihan pimpinan diserahkan kepada musyawarah ummat Islam.

Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Demokrasi sendiri mendapatkan bentuknya sendiri-sendiri sesuai dengan penafsiran budaya masing-masing Negara, alasan ini terkadang sering digunakan oleh beberapa rezim untuk menutup atau membuka kran demokrasi secara perlahan-lahan.

Robert Dahl merumuskan tatanan politik demokrasi dengan istilah poliarki. Demokrasi sendiri menurut Robert Dahl adalah suatu system pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok⁵⁷ yaitu :

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif, pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa ;
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok social (warga Negara dewasa) yang dikecualikan ;

⁵⁷ MM. Billah, Perkembangan Ornop di Indonesia,, Agustus 2000, halaman 12, CPSM Jakarta.

3. Kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, pers, berorganisasi yang cukup untuk menjamin integritas dan partisipasi politik.

Sistem Demokrasi mencerminkan mekanisme politik yang dianggap bisa menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap preferensi dan keinginan warga negaranya. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan⁵⁸ untuk :

- a. Merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri ;
Memberitahukan preferensi atau kepentingannya itu kepada sesama warga Negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif ; dan
- b. mengusahakan agar kepentingan itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak dibedakan berdasarkan isi atau asal-usulnya.

Kesempatan bagi rakyat hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjain adanya berbagai kondisi ⁵⁹berupa :

- Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi ;
- Kebebasan mengungkapkan pendapat ;
- Hak untuk memilih dalam pemilihan umum ;
- Hak untuk menduduki jabatan publik ;
- Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara ;
- Tersedianya sumber-sumber informasi alternative ;
- Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur ;
- Adanya lembaga-lembaga pengendalian atas asset politik dan ekonomi yang disdistribusikans ecara luas dan arau sinoformasi yang terbuka sehingga ada kemajuan yang merata dan berkesinambungan.

⁵⁸ MM. Billah, ibid.

⁵⁹ MM. Billah, ibid

Demokrasi dapat dikategorikan ke dalam :

2.3.1 Demokrasi konstitusional

Adalah [sistem politik](#) yang melindungi secara [konstitusional](#) hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Negara dibatasi untuk menjaga hak-hak individu dan kebebasan dasar warga negara. Hak-hak individu dan kebebasan dasar manusia dilindungi dan dipenuhi karena konstitusi mewajibkan Negara untuk melindungi dan memenuhinya. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya disandingkan dengan [demokrasi melalui pemilihan langsung](#) yang dilakukan secara berkala untuk memperbaharui kontrak sosial Negara dengan rakyat. Demokrasi ini dikenalkan di Indonesia oleh Mohammad Hatta, seiring dengan berkembangnya paham konstitusionalisme di dunia dan Indonesia.⁶⁰

Selain demokrasi konstitusional terdapat juga bentuk lain demokrasi bentuk lain, yaitu :

2.3.2 Demokrasi Sosial model Tan Malaka

Atau dikenal anarcho-syndicalis⁶¹ adalah sebuah paham politik yang sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan [sosialisme](#). Sistem demokrasi ini bertujuan mewujudkan kekuasaan penuh rakyat jelata atas Negara agar tercapai kemakmuran yang merata hingga menyentuh rakyat jelata yang berada di dasar piramida struktur sosial. Pengambilalihan kekuasaan Negara dilakukan melalui massa aksi. Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk [negara](#), [pemerintahan](#), dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan rakyat, oleh karena itu [negara](#), pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan dan tidak perlu ada dan diada-adakan. Atas tujuan tersebut segala bentuk kekacauan terutama oleh pihak-pihak yang mapan akan langsung disebut anarki.

Anarkisme berasal dari kata dasar "anarki" dengan imbuhan -isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari anarchy (bahasa Inggris) atau anarchie (Belanda/Jerman/Prancis), yang berakar dari kata [bahasa Yunani](#), anarchos/anarchein

⁶⁰ MM. Billah. Op.cit. h.12.

⁶¹ Ibid, h.13.

yang berarti "tanpa pemerintahan" atau "pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya.

Anarkisme adalah teori [politik](#) yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa [hirarkis](#) (baik dalam [politik](#), [ekonomi](#), maupun [sosial](#)). Para [Anarkis](#) berusaha mempertahankan bahwa [anarki](#), ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. [Anarkis](#) melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya. Yang sangat sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan. Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode [propaganda by the deed](#), yaitu metode gerakan dengan menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan. Selama hal tersebut ditujukan untuk menyerang kapitalisme ataupun negara. Slogan para anarkis Spanyol pengikut [Durruti](#) yang berbunyi : Terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan

Namun demikian, tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepakat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, sebagaimana [pemikiran Alexander Berkman](#) :

Anarkisme bukan Bom, ketidakteraturan atau kekacauan. Bukan perampokan dan pembunuhan. Bukan pula sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua. Bukan berarti kembali kekehidupan barbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. Anarkisme berarti bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorangpun boleh memperbudak anda, menjadi majikan anda, merampok anda, ataupun memaksa anda. Itu berarti bahwa anda harus bebas untuk melakukan apa yang anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang anda mau serta hidup didalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, serta hidup dalam perdamaian dan harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan, monopoli, kemiskinan, penindasan, terkecuali menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan.

Dari berbagai selisih paham antar anarkis dalam mendefinisikan suatu ide kekerasan sebagai sebuah metode, kekerasan tetaplah bukan merupakan suatu ide eksklusif milik anarkisme, sehingga anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai kekerasan, seperti makna tentang anarkisme yang banyak dikutip oleh berbagai media di Indonesia yang berarti sebagai sebuah aksi kekerasan. Karena bagaimanapun kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun. Anarkisme sebagai sebuah ide yang dalam perkembangannya juga menjadi sebuah filsafat yang juga memiliki perkembangan serta dinamika yang cukup menarik. Ide-ide [anarkis](#) bisa ditemui dalam setiap periode sejarah, walaupun masih banyak penelitian yang harus dilakukan dalam bidang ini. Anarkisme berusaha mengadili penyimpangan [negara](#) dan gereja.

Kelompok anarkisme menekankan pada egalitarianism (persamaan), penghapusan hirarki sosial (social hierarchy), penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara dan hak milik pribadi adalah hal-hal yang tidak seharusnya eksis dalam anarkisme. Setiap orang dan kelompok berhak dan bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri.

Selain tersebut diatas, masih banyak lagi aliran lain yang memakai pemikiran anarkisme sebagai dasarnya. Antara lain :

Post-Anarchism, yang dikembangkan oleh [Saul Newman](#) dan merupakan sintesis antara teori anarkisme klasik dan pemikiran post-strukturalis.

Anarki pasca-kiri, yang merupakan sintesis antara pemikiran anarkisme dengan gerakan anti-otoritas revolusioner diluar pemikiran “kiri” mainstream.

[Anarka-Feminisme](#), yang lebih menekankan pada penolakan pada konsep patriarka yang merupakan perwujudan hirarki kekuasaan. Tokohnya antara lain adalah [Emma Goldman](#).

[Eko-Anarkisme](#) dan [Anarkisme Hijau](#), yang lebih menekankan pada lingkungan.

[Anarkisme insureksioner](#), yang merupakan gerakan anarkis yang menentang segala organisasi anarkis dalam bentuk yang formal, seperti serikat buruh, maupun federasi.

Yang patut mencadi perhatian tersendiri dalam demokrasi modern adalah peran tentara dalam menegakkan demokrasi dan pemerintahan yang baik (good

governance). Di Thailand, tentara melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang korup dan mendapat mosi tidak percaya dari rakyat melalui parlemen jalanan (massa-aksi). Tentara kemudian membuat jadwal untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Di Indonesia tentara memberikan dan mengawal jalan bagi kaum reformis untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan baik. Padahal kesempatan untuk meraih kekuasaan ada di depan mata, semboyan mengabdikan pada Negara tanpa cacat menjadi populer. Di Niger Kolonel Adamou Haroun mengkudeta Presiden Mamadou Tandja (yang berkuasa menjadi Presiden melalui pemilihan umum yang demokratis setelah sebelumnya tentara dibawah pimpinan Mayor Jenderal Wengker melakukan sebuah kudeta), karena Presiden telah berkuasa untuk kedua kalinya dan berusaha merubah konstitusi Negara yang menetapkan dirinya menjadi Presiden Seumur Hidup. Alasan tentara mengkudeta adalah untuk mengembalikan konstitusi agar tidak menyimpang dari demokrasi dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Tentara menjadi pengawal demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah sejarah baru dalam dunia ketentaraan, yang sebelumnya tentara hanya semata-mata menjadi alat kekuasaan. Kesadaran akan Demokrasi tentunya berbeda-beda di masyarakat. Secara substansial, Demokrasi terkadang terlihat sejalan dengan praktek kekuasaan yang melahirkan pemimpin terpilih yang dihasilkan melalui prosedur Demokrasi. Terkadang terlihat juga tidak sejalan dengan praktek kekuasaan yang melahirkan pemimpin terpilih melalui prosedur Demokrasi.

2.3.3 Praktek-praktek kekuasaan

Praktek-praktek kekuasaan yang sejalan maupun tidak sejalan dengan substansi demokrasi diantaranya adalah, sebagai berikut :

1. Meritokrasi, berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk [sistem politik](#) yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap saja dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat [KKN](#) terutama pada aspek [nepotisme](#).